



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dalam rangka membentuk arah pembangunan daerah tahun 2005-2025 maka daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program saluran kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disektor dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2005-2025.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar merupakan Dokumen Perencanaan bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan pembangunan dua puluh tahun.

Pasal 2

Sistematika RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KONDISI UMUM DAERAH
- BAB III : VISI DAN MISI KABUPATEN KARANGANYAR
- BAB IV : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 14 Juli 2009



Hj. RINA IRIANI SRIPATNANINGSIH SPd, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 14 JULI 2009



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2005-2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2009**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
	1.1. LATAR BELAKANG.....	I-1
	1.2. PENGERTIAN.....	I-4
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-4
	1.4. LANDASAN HUKUM.....	I-5
	1.5. HUBUNGAN RPJP KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.....	I-6
	1.6. SISTIMATIKA.....	I-7
BAB II	KONDISI UMUM DAERAH.....	II-1
	2.1. KONDISI MASA KINI.....	II-1
	2.2. TANTANGAN.....	II-23
	2.3. MODAL DASAR.....	II-28
BAB III	VISI DAN MISI KABUPATEN KARANGANYAR	III-1
	3.1. VISI DAN MISI	III-1
BAB IV	ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025	IV-1
	4.1. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN.....	IV-1
	4.2. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG..... TAHUN 2005-2025	IV-19
	4.3. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS..... PEMBANGUNAN DAERAH	IV-25
BAB V	PENUTUP.....	V-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, berada di ujung timur Provinsi Jawa Tengah yaitu di perbatasan Provinsi Tengah dan Jawa Timur antara 7⁰28' dan 7⁰46' Lintang Selatan dan antara 110⁰40' dan 110⁰70' Bujur Timur serta terletak berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Kabupaten Sragen di sebelah utara. Luas wilayah 773,78 km² terdiri dari 17 Kecamatan, 162 Desa, 15 Kelurahan, 1.091 Dusun, 2.313 Dukuh, 1.871 RW dan 6.130 RT.

Dilihat dari sejarahnya Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dari 3 jaman :

1. Jaman Penjajahan Belanda

Pada tahun 1847 Sri Mangkunegoro III yang memegang pimpinan Swapraja Mangkunegaran (1835-1853), mengadakan tatanan dengan mengambil peraturan yang berlaku di Kasunanan Surakarta yaitu Staatsblad 1847 Nomor 30 yang mulai berlaku tanggal 5 Juni 1847 sebagai berikut :

a. Bahwa wilayah Swapraja Mangkunegaran terdiri dari 3 *ONDERREGENTSCHAP* (Kabupaten Anom) yaitu :

- *Onderregentscap* Karanganyar
- *Onderregentscap* Wonogiri
- *Onderregentscap* Malangjiwan

Dengan demikian mulai tanggal 5 Juni 1847 Karanganyar menjadi nama *Onderregentscap* dan dikepalai oleh seorang Wedono Gunung.

b. Pada waktu Sri Mangkunegoro VII memegang pimpinan Swapraja Mangkunegaran (1916-1944) beliau mengadakan tatanan baru antara lain :

- Pada tahun 1917 atas dasar Ryksblad 1917 Nomor 37 yang mulai berlaku tanggal 20 Nopember 1917 status *Onderregentscap* dirubah menjadi *Regentscap* (Kabupaten) yang dikepalai oleh seorang Bupati Pangreh Praja. Oleh karena di Swapraja Mangkunegaran ada 3 Kabupaten (*Regentscap*) yaitu : Kabupaten Kota Mangkunegaran, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri.

Dengan demikian mulai tanggal 20 Nopember 1917 Karanganyar menjadi KABUPATEN KARANGANYAR dengan nama ibukotanya juga KARANGANYAR.

- Pada tahun 1929 Kabupaten Kota Mangkunegaran dihapuskan, bekas wilayahnya masuk wilayah Kabupaten Karanganyar.
- Pada tahun 1930 Kabupaten Karanganyar dihapuskan lalu dihidupkan kembali Kabupaten Kota Mangkunegaran. Bekas wilayah Kabupaten Karanganyar menjadi wilayah Kabupaten Kota Mangkunegaran. Karanganyar hanyalah menjadi Kawedanan dan masuk wilayah Kabupaten Kota Mangkunegaran.

2. Jaman Penjajahan Jepang

Pada jaman penjajahan Jepang (1942-1945) Swapraja Mangkunegaran tetap dipertahankan seperti pada jaman penjajahan Belanda, yaitu bahwa Karanganyar tetap berupa Kawedanan yang berada di wilayah Kabupaten Kota Mangkunegaran.

3. Jaman Kemerdekaan

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Karanganyar menjadi :

- a. Kawedanan Wonoharjo, meliputi Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Colomadu;
- b. Kawedanan Karanganyar meliputi Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Mojogedang;
- c. Kawedanan Karangpandan meliputi Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Matesih, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Jenawi.
- d. Kawedanan Jumapolo meliputi Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Jatipuro.

Setelah terjadinya reformasi Kawedanan-kawedanan dihapuskan.

Semenjak terbentuknya hingga saat ini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar beserta segenap komponen masyarakat Karanganyar telah diupayakan guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya serta lingkungan hidup. Selama ini telah dikenal beberapa rencana pembangunan yang disusun untuk memberikan arah pembangunan daerah. Rencana pembangunan ada yang berdimensi waktu jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Rencana pembangunan daerah sangat diperlukan sebagai jawaban atas perubahan terhadap perkembangan keadaan. Dengan perencanaan diharapkan Pemerintah Daerah dapat merencanakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan cara mengelola kegiatan yang berorientasi pada masa depan dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, seperti yang diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kabupaten Karanganyar menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun (2005-2025).

1.2. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar yang merupakan jabaran dari tujuan terbentuknya Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai tahun 2005 sampai tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.

Adapun tujuan penyusunan RPJPD ini adalah untuk memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, arah dan program kepala daerah terpilih.

1.4. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia 007 Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Kesatu Atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;

1.5. HUBUNGAN RPJPD KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

1. Perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, penyusunan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
2. RPJPD Kabupaten Karanganyar tahun 2005-2025, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan.
3. RPJPD Karanganyar merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah, tantangan, dan prioritas pembangunan jangka panjang

daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

1.6. SISTIMATIKA

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kondisi Umum Daerah

Bab III : Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah

Bab IV : Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025

Bab V : Penutup

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1. KONDISI MASA KINI

2.1.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Bangsa

1. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Penduduk merupakan subyek dan obyek pembangunan, dengan demikian penduduk harus di bina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak dan sekaligus penikmat hasil-hasil pembangunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2001 sebanyak 804.031 jiwa dan pada Tahun 2005 meningkat menjadi 840.687 jiwa yang terdiri dari perempuan sebanyak 424.579 jiwa dan laki-laki sebanyak 416.108 jiwa atau dengan ratio jenis kelamin 98,00. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,91% pertahun, sedang kepadatan penduduk rata-rata 1.086 jiwa/km .

Dilihat dari sebaran penduduk Kabupaten Karanganyar di 17 Kecamatan, maka Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Karanganyar, yaitu 72.750 jiwa (8,65%), kemudian Jaten 68.528 jiwa (8,15%) dan Kecamatan Gondangrejo 63.584 jiwa (7,68%), sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Jenawi yaitu 27.133 jiwa (3,23%), Ngargoyoso 34.745 jiwa (4,13%) dan Kecamatan Kerjo 36.659 jiwa (4,38%).

Dilihat dari kelompok umur terlihat bahwa kelompok umur usia produktif (15-64 tahun) sebesar 565.786 jiwa (67,30%) dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebesar 274.901 jiwa (32,70%). Dengan demikian angka beban tanggungan penduduk usia produktif (*dependency ratio*) sebesar 48,58%.

Peserta Keluarga Berencana (KB) aktif pada Tahun 2001 tercatat sebanyak 118.431 dan pada Tahun 2005 meningkat menjadi 129.077,

dengan rincian 75.746 menggunakan suntik, 18.413 melalui MO dan 6.178 menggunakan IML. Jumlah peserta KB pria sangat rendah yang disebabkan antara lain oleh terbatasnya pilihan alat kontrasepsi, layanan KB pria dan masih berkembangnya anggapan dalam masyarakat bahwa masalah KB merupakan urusan wanita.

Upaya untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk telah dilakukan antara lain melalui pelayanan KB, peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi, peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, peningkatan keikutsertaan pria dalam ber-KB dan penguatan jaringan program.

2. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Jumlah pencari kerja Tahun 2005 sebanyak 9.203 orang dengan rincian, laki-laki 4.454 orang dan perempuan 4.845 orang. Dibandingkan Tahun 2004, ada penurunan jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar. Dari jumlah tersebut lulusan SLTA tercatat paling besar yaitu 6.009 orang (64,59%) dan paling sedikit lulusan SD yaitu 102 orang (1,10%). Pencari kerja yang sudah ditempatkan pada Tahun 2005 sebanyak 494 orang. Hal ini berarti masih banyak pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.

Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian, yaitu 223.452 orang (32,02%), adapun lainnya buruh industri 97.151 orang (13,92%), buruh bangunan 47.288 orang (6,78%) dan Pedagang 40.002 orang (5,73%). Selebihnya pengusaha, PNS, TNI/POLRI dan pekerjaan lain.

Upaya perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran telah dilakukan, antara lain melalui penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, penyelenggaraan bursa kerja dan pengembangan informasi tenaga kerja. Adapun upaya peningkatan kualitas

dan produktivitas tenaga kerja dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan.

Upaya perluasan kesempatan kerja juga dilakukan melalui program transmigrasi. Banyaknya jumlah transmigran dari Kabupaten Karanganyar dari kurun waktu Tahun 2001-2005 mengalami fluktuasi.

Pada Tahun 2001 tercatat sebanyak 22 KK (66 jiwa).

Pada Tahun 2002 tercatat sebanyak 25 KK (78 jiwa).

Pada Tahun 2003 tercatat sebanyak 100 KK (341 jiwa).

Pada Tahun 2004 tercatat sebanyak 25 KK (82 jiwa) dan

Pada Tahun 2005 tercatat sebanyak 30 KK (107 jiwa).

Pelaksanaan program transmigrasi tidak semata-mata ditekankan pada target pemindahan penduduk saja, tetapi pada pencapaian kesejahteraan transmigran dan perannya dalam rangka pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah penempatan.

3. Pendidikan

Dalam rangka pembangunan bangsa, pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan melalui pembangunan pendidikan di Kabupaten Karanganyar yang selama ini telah diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Karanganyar yang berkualitas, cerdas, produktif dan berakhlak mulia dengan pengembangan dan peningkatan pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan iptek dan kebutuhan pasar kerja.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Karanganyar selain memperhatikan sistem Pendidikan Nasional yang berjalan juga memperhatikan sasaran komitmen di bidang pendidikan dan kesepakatan Pendidikan Untuk Semua (PUS)

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karanganyar selain dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal juga dilaksanakan melalui jalur

non formal. Jalur formal terdiri atas jenjang pendidikan dasar, menengah, sampai dengan pendidikan tinggi.

Pada Tahun Ajaran 2005/2006 Kabupaten Karanganyar memiliki 556 unit SD/MI dengan jumlah guru sebanyak 4.483 orang dan 81.057 siswa. Tingkat SMP/MTs/ sederajat memiliki 98 unit sekolah dengan guru sebanyak 2,818 orang dan siswa sebanyak 37.548 orang. Tingkat SLTA/SMK terdapat 45 unit sekolah dengan guru sebanyak 1.639 orang dengan murid 20.507 orang. Jumlah Perguruan Tinggi terdapat: 12 semuanya swasta.

4. Perpustakaan

Upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dilakukan melalui penyediaan layanan perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat. Perpustakaan umum di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2005 ada 1 unit, perpustakaan khusus SLTA ada 15 unit, SLTP ada semua, perpustakaan desa ada 17, taman bacaan ada 13 dan perpustakaan keliling ada 2 unit .

5. Pemuda dan Olah Raga

Pada Tahun 2005 jumlah pemuda usia 13 sampai dengan 39 tahun berjumlah 358.133 jiwa atau 42.60 % dari jumlah penduduk. Jumlah pemuda yang sebesar ini merupakan aset sebagai kader pemimpin, pelopor dan penggerak pembangunan. Pembinaan kepemudaan dilakukan dengan melalui berbagai pendekatan institusional seperti Pramuka, Karang Taruna, KNPI dan organisasi kepemudaan lainnya.

Sarana dan prasarana olah raga yang ada di Kabupaten Karanganyar masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Kondisi keolahragaan baik olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat masih memerlukan perhatian berkelanjutan. Dalam hal prestasi Kabupaten Karanganyar menempati ranking ke 9 dalam PORDA tingkat Jawa Tengah Tahun 2004 dengan perolehan medali 16 emas, 13 perak dan 18 perunggu.

6. Kesehatan

Derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Karanganyar dapat di lihat dari 3 indikator utama yaitu : Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Usia Harapan Hidup (UHH). Berdasarkan hasil survey Kesehatan Daerah pada Tahun 2005, AKI tercatat sebesar 94,7 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu terbanyak adalah Pendarahan, Eklamsi, Pendarahan sebelum persalinan dan infeksi. AKB sebesar 9,2 per 1.000 kelahiran hidup, untuk UHH di Kabupaten Karanganyar tercatat 71,8 pada Tahun 2005.

Prevalensi Balita dengan gizi buruk di Kabupaten Karanganyar cenderung meningkat. Meningkatnya prevalensi balita gizi buruk antra lain disebabkan oleh semakin memburuknya keadaan ekonomi keluarga yang berdampak terhadap kecukupan pangan di tingkat keluarga dan sulitnya lapangan pekerjaan.

Dalam hal penyakit, di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2005 ada 10 besar kasus penyakit di Puskesmas, antara lain : Infeksi akut pada saluran pernafasan 108.325 atau 39,96%; penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat 48.292 atau 17.81%; penyakit tekanan darah tinggi 24.299 atau 8,96%; penyakit pada sistem pencernaan 23.357 atau 8,62%; penyakit kulit alergi 17.888 atau 6,60%; penyakit gusi dan periodontal 15.910 atau 5,87%; penyakit kulit infeksi 12.258 atau 4,52%; diare 9.457 atau 3,49%; penyakit lain-lain 5.674 atau 2,09%; konjungtifitas 5.634 atau 2,08%.

Angka Kesakitan Daerah Tahun 2005 ditunjukkan oleh 12 kasus malaria positif dengan angka kesakitan 15,7 dan, 135 kasus demam berdarah dengan angka kesakitan 1,6 per 10.000 penduduk, 16 kasus (orang) penderita kusta, 13.241 kasus (orang) penderita diare dan 1.685 Balita penderita ISPA (kasus pneumonia) serta 2 kasus baru HIV/AIDS dengan total penderita HIV 6 orang, AIDS 3 orang dan meninggal 3 orang.

Data kesehatan lingkungan menunjukkan ketersediaan air bersih 58,3% (113.609 KK dari 194.748 KK), ketersediaan jamban keluarga 68,2% (132.840 KK), pengelolaan air limbah 48,6% (94.562 KK), yang memiliki tempat sampah 2.602 KK serta sarana umum terdiri dari hotel (77,8%), rumah makan (79,8%) pasar (16,7%) dan TUPM lain 78%.

Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di unit kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 antara lain : Dokter spesialis 46, dokter umum 80, dokter gigi 24, bidan 275 dan perawat 241.

Jumlah fasilitas kesehatan antara lain : Rumah sakit 3, Puskesmas 21, Puskesmas pembantu 60, Rumah bersalin swasta 28, Balai pengobatan swasta 30.

7. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat ditandai dengan fenomena permasalahan kesejahteraan sosial. Berbagai upaya telah dilakukan, namun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih tetap muncul di tengah masyarakat.

Pada Tahun 2005 terdapat fakir miskin sejumlah 23.231 orang, Balita terlantar 406 orang, anak terlantar 982 orang, lanjut usia terlantar 2.041 orang, gelandangan dan pengemis 28 orang, penyandang cacat 3.288 orang.

Sebagai upaya penanganan PMKS di Kabupaten Karanganyar terdapat 9 Panti Sosial Asuhan Anak dan 1 Panti Sosial Petirahan Anak. Sedangkan jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 885 orang.

8. Kemiskinan

Secara umum penyebab dan kondisi masyarakat miskin di Kabupaten Karanganyar di tandai dengan adanya ketidak-berdayaan atau ketidak-mampuan (*Power Lessness*) dalam hal :

- a. Memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (*Basic need deprivation*). Dengan kondisi masyarakat yang jumlah penderita penyakit menular cukup tinggi, menjadi indikasi rendahnya kondisi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar sehingga tidak memperhatikan lagi kesehatan.
- b. Melakukan kegiatan yang tidak produktif (*Unproductiveness*). Berdasarkan Karanganyar Dalam Angka Tahun 2005 jumlah pengangguran di dominasi oleh lulusan SLTA. Dengan jumlah pengangguran yang besar menjadikan potensi kemiskinan semakin besar.
- c. Tidak bisa menjangkau akses Sumber Sosial dan Ekonomi (*Inaccessability*).

- d. Menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, perasaan ketakutan dan kecurigaan serta sikap apatis dan fatalistik (*Vuunecability*).
- e. Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin .

Jumlah KK miskin di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2005 sekitar 68.061 KK dari keseluruhan KK yang ada yaitu 208.345 atau 32,6%.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar telah menjadi agenda dan prioritas utama dengan berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan baik yang bersifat langsung (program khusus) maupun yang tidak langsung (program Sektoral dan Regional); namun demikian hasilnya belum maksimal.

9. Kebudayaan

Mayoritas penduduk Kabupaten Karanganyar adalah suku Jawa, yang pada umumnya menggunakan bahasa jawa sebagai bahasa sehari-hari. Seni budaya yang menonjol eksistensinya adalah karawitan, wayang kulit, ketoprak, seni tari jawa, campursari/ keroncong dan kesenian lesung.

Upaya mempertahankan seni budaya dilakukan dengan sering dilaksanakan pagelaran seni dalam rangka memeriahkan event-event tertentu. Sementara itu budaya gotong-royong, tolong-menolong masih bertahan di lingkungan masyarakat.

10. Agama

Kehidupan beragama di Kabupaten Karanganyar berlangsung dengan kondusif dalam toleransi yang cukup tinggi. Hal ini di karenakan adanya kesadaran dan rasa toleransi yang tinggi di antara pemeluk agama, salah satunya dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang ada di sekitar warga yang majemuk seperti : masjid, gereja, vihara dan pura. Jumlah tempat

ibadah pada tahun 2005 mencapai 2.640 buah terdiri atas : 821 masjid, 679 Mushola, 127 Gereja, 12 Pura, 1 Vihara. Dengan jumlah pemeluk : Islam: 795.474, Katolik: 17.714, Kristen protestan: 20.799, Hindu: 5.950, Budha: 750.

11. Perempuan dan Anak

Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Karanganyar relatif lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Dengan jumlah yang hampir berimbang namun dalam partisipasi aktif setiap proses pembangunan peran perempuan belum optimal.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan, utamanya partisipasi aktif perempuan, Pemerintah telah mengembangkan berbagai program peningkatan peran perempuan yang sekarang lebih dikenal sebagai pemberdayaan perempuan. Strategi yang digunakan Pemerintah sekarang ini telah menggeser dari *Women in Development* (WID/ perempuan dalam pembangunan) ke arah *Gender Main-streaming* (GM/ Pengarus-utamaan Gender). Pergeseran tersebut membawa implikasi pada pendekatan yang dilakukan dalam meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan.

Indikator makro yang digunakan untuk mengukur kesetaraan dan keadilan Gender (KKU) adalah *Gender Related Development Index (GDI)* dan *Gender Empowerment Measures (GEM)*. Berdasarkan indikator tersebut, maka GDI Kabupaten Karanganyar pada Tahun 1999 adalah 58.3 dan Tahun 2002 sedikit meningkat menjadi 61, Kabupaten Karanganyar berada di urutan ke 86 dari 294 Kabupaten/Kota di Indonesia. Kemudian untuk GEM menunjukkan angka sebesar 54,7 pada Tahun 1999 dan Tahun 2002 meningkat menjadi 61,2 dan berada pada ranking atau peringkat ke-5.

Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan *Gender* (KKG) serta perlindungan anak, beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Karanganyar adalah pengembangan potensi kesejahteraan keluarga; pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan dan ekonomi; peningkatan peran serta masyarakat dan kemampuan kelembagaan; Pengarusutamaan *Gender* (PUG); Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; serta Peningkatan Kesejahteraan dan perlindungan anak.

2.1.2. Ekonomi

1. Kondisi dan Struktur Ekonomi

Perekonomian di Kabupaten Karanganyar secara makro pada Tahun 2005 mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dari data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun 2005 mengalami pertumbuhan sebesar 3,19%. Peningkatan ini didorong oleh ekspor migas yang masing masing meningkat sebesar 48,2 % dan 15,4 %.

Struktur perekonomian di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2005 didominasi oleh 3 sektor, yaitu industri pengolahan sebesar 51,55%, pertanian 19,68%, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,33%. Sektor lainnya yang mempunyai kontribusi dalam PDRB adalah pertambangan dan pengalihan sebesar 0,86%, listrik, gas dan air minum sebesar 1,38%, bangunan sebesar 2,43%, pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,89%, keuangan, persewaan dan jasa-jasa sebesar 2,14% dan jasa-jasa sebesar 7,74 %,.

2. Industri

Salah satu sektor andalan di Kabupaten Karanganyar adalah sektor industri, dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selama 5 tahun terakhir omzet sektor industri meningkat, yaitu dari 4.181 trilyun pada Tahun 2001 menjadi 5,753 trilyun pada Tahun 2005. Adapun jumlah investasi industri di Karanganyar mengalami peningkatan dari

30,364 milyar pada Tahun 2001 menjadi 869,100 milyar pada Tahun 2005. Sementara itu jumlah industri meningkat dari 8592 unit pada Tahun 2001 menjadi 11.360 pada Tahun 2005 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 85.854 orang pada Tahun 2005.

3. Koperasi dan UKM

Sampai dengan Tahun 2005 di Kabupaten Karanganyar terdapat 753 buah koperasi, meliputi KUD 17 buah, koperasi fungsional 75 buah, Koperasi Karyawan 85 buah, Inkara 3 buah, koperasi jasa 10 buah, perkreditan 2 buah, koperasi pemuda/wanita 5 buah, koperasi golongan masyarakat (KKT+KSU) 552 buah dan Koperasi Pusat 4 buah. Sedangkan Pengusaha Kecil Menengah berjumlah 1.029 orang, terdiri dari : Jenis perdagangan 675 UKM, jenis industri 333 UKM dan jasa/aneka usaha 147 UKM.

4. Investasi

Investasi PMA/PMDN di Karanganyar dapat dilihat dari jumlah perusahaan selama 5 tahun terakhir yang mengalami kenaikan dari Tahun 2001 sejumlah 35 perusahaan menjadi 39 perusahaan pada Tahun 2005, nilai investasi mengalami kenaikan dari Tahun 2001 sebesar 1.590.308.898.471 menjadi 2.253.217.949.939,87 pada Tahun 2005. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 26.224 orang dan Tenaga Kerja Asing (TKA) 22 orang.

Agar tercapai pemenuhan kebutuhan investasi swasta dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah, yang meliputi penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah propinsi mendukung penciptaan kebijakan pemerintah yang pro investasi dan mendorong berkembangnya sektor riil. Kebijakan tersebut merupakan salah satu penciptaan iklim kondusif bagi investor dalam dan luar negeri dalam segala hal di antaranya, kepastian hukum, promosi terpadu, intermediasi perbankan, ketenaga kerjaan

kebijakan tata ruang yang konsisten dan penyediaan invrastruktur yang memadai.

5. Pertanian

Produksi padi di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2005 mencapai 225.563 ton (setara dengan 124.795 ton beras). Sedangkan konsumsi beras sebesar 95.124 ton, sehingga terdapat surplus 29.671 ton. Pada sektor peternakan, produksi daging mencapai 4.866 ton, susu 172.800 liter dan telur 13.808.786 (meliputi telur ayam buras, ayam ras, itik dan puyuh)

Luas areal perkebunan rakyat terdiri dari cengkeh 2.624 Ha, kelapa 3.130 Ha, tebu 1.998 Ha, kopi 160 Ha, empon-empon 650,15 Ha (meliputi jahe, kencur dan kunir).

6. Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Karanganyar 940.055 kg, yaitu dari cekdam, kolam, sungai dan waduk.

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2005 relatif sangat kecil, yaitu 0,12%. Hal ini disebabkan oleh pekerjaan perikanan merupakan usaha sampingan.

7. Pertambangan

Dalam bidang pertambangan, luas lahan bahan galian C sebesar 7.597,864 Ha. meliputi batu gamping, andesit, kaolin, pasir gunung, tanah liat dan tras.

8. Perdagangan

Keberhasilan perdagangan salah satunya dapat dilihat dari indikator nilai ekspor. Untuk Tahun 2005 di Kabupaten Karanganyar senilai

730,439,000 US\$. Komoditi ekspor tersebut berupa tekstil senilai 2,200,000 US\$, diikuti garment 1,758,000 US\$, selanjutnya kantong plastik 1,450,890 US\$ dan jamu tradisional, kursi lipat serta kayu olahan.

9. Pariwisata

Pengembangan wilayah Kabupaten Karanganyar ditempuh melalui tiga pilar yakni Industri, Pertanian dan Pariwisata (INTAN PARI) yang terus digalakkan melalui berbagai strategi. Salah satu bidang sumberdaya yang diyakini akan meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi Wilayah adalah dengan pemberdayaan dan pemanfaatan sumberdaya berupa berbagai potensi wisata yang punya prospektif dan potensial untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Karanganyar memiliki potensi wisata baik wisata alam, budaya maupun buatan, dikembangkan sebagai obyek wisata rekreatif dan menarik. Potensi wisata berupa keindahan alam peninggalan sejarah, adat istiadat dan kesenian segala jenis dan bentuknya dapat menjadi modal dasar dalam mengembangkan berbagai kegiatan wisata yang menarik. Jenis obyek wisata di Kabupaten Karanganyar berupa obyek wisata alam sebanyak 18 buah, obyek wisata budaya sebanyak 14 buah dan obyek wisata buatan 7 buah. Jumlah pengunjung pada Tahun 2005 sebanyak 572.513 orang, jumlah pendapatan sebesar Rp 401.312.551,00.

2.1.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) selama ini cukup mengalami kemajuan yang berarti. Kiranya perlu dipahami bahwa penelitian tidak harus dipahami sebagai penelitian murni. Penelitian bisa saja termasuk kajian-kajian praktis seperti NSAD, Amdal jalan tembus Tawangmangu-Sarangan dan sebagainya.

Hasil temuan teknologi tepat guna bagi masyarakat sangat bermanfaat dalam membantu kehidupan perekonomian, terutama bagi masyarakat pedesaan yang bergerak di bidang industri yang bahan bakunya menggunakan bahan lokal, misalnya pembuatan foging dari bahan-bahan bekas, membran untuk speaker, alat pengering, ukiran batik dan sebagainya. Berbagai temuan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi sebagai perwujudan e-goverment untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar. Infrastruktur berupa hardware dan software jaringan komputer on line telah terpasang di semua SKPD dan 17 Kecamatan. Web site Kabupaten Karanganyar (www.karanganyar.go.id) sebagai media informasi yang dapat diakses melalui internet.

2.1.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana wilayah (infrastruktur), terutama sarana prasarana perhubungan darat, khususnya kualitas jaringan jalan perkotaan maupun permasalahan kemacetan dan kesemerawutan lalu lintas di perlintasaan kereta api Palur dengan jalan raya yang tidak mampu melayani volume lalulintas yang ada serta terdapat 3 (tiga) titik konflik lalulintas yang berasal dari pertemuan sebidang.

Kondisi jalan pada Tahun 2005 adalah panjang jalan nominal sepanjang 16,90 Km dalam kondisi jalan baik. Panjang jalan Propinsi sepanjang 37,94 Km kondisinya baik, sepanjang 45,3 Km kondisinya sedang dan 11,70 Km kondisi jalan rusak. Panjang jalan Propinsi keseluruhan 95,03 Km dan jalan Kabupaten sepanjang 817,20 Km pada Tahun 2005, sepanjang

359,32 Km kondisi jalan baik, sepanjang 325,18 Km kondisi jalan sedang dan 65,62 Km kondisi jalan rusak serta 67,10 Km kondisi jalan rusak berat.

1. Perhubungan

Kondisi perhubungan darat di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2005 dapat terlihat dari jumlah terminal tipe B sebanyak 3 buah dan tipe C sebanyak 5 buah. Jumlah Bus (AKAP) sebanyak 140 buah dan angkutan umum sebanyak 313 buah untuk melayani 14 jaringan trayek.

2. Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan Pemukiman kondisinya belum memadai sebagai sarana prasarana dasar sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan kualitas kehidupan manusia. Ketersediaan sumberdayanya erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup dan kemiskinan. Kondisi perumahan pada Tahun 2004 telah terbangun 181.241 unit rumah/tahun. Tahun 2005 telah terbangun perumahan 186.786 unit rumah yang terdiri dari:

- Perumahan : 151.186 unit rumah
- Semi perumahan : 13.808 unit rumah
- Non perumahan : 21.792 unit rumah

3. Sumber Daya Air

Prasarana dan Sarana sumber daya air dan irigasi mempunyai nilai strategis dalam menunjang peningkatan produksi pertanian, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, pengembangan pemukiman, industri, pariwisata, kelistrikan dan sebagainya. Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 memiliki sungai-sungai induk 5 buah dengan panjang 126 km, 2 buah waduk dan 3 buah lumbung atau waduk lapangan.

Kapasitas ketersediaan air permukaan sebesar 11.110.960 m³/tahun, yang berasal dari mata air 11.060 L/DT/tahun, Sungai utama 103.725 km /tahun.

Sebaran ketersediaan air pada musim penghujan 0,71% (Selama sekitar 5 bulan) dan 0,29% tersedia pada musim kemarau (Selama 7 bulan).Sawah yang dilayani jaringan irigasi teknis seluas 8.218.97 ha/ sebanyak 353.Daerah irigasi (DI) terdiri atas 15 DI dengan luas 2.7310 ha menjadi kewenangan Propinsi, dan 308 DI dengan luas 18104.55 Ha. adalah kewenangan Kabupaten / kota. Namun dalam euphoria otonomi daerah masih terjadi pengelolaan sumber daya air yang belum sinkron / sinergis dan terpadu dalam satu sistem pengelolaan antara kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ketersediaan dan kualitas air di Kabupaten Karanganyar cenderung tidak menentu, hal ini dipengaruhi oleh perubahan iklim global maupun musim kemarau dan terjadinya degradasi Daerah tangkapan air (DTA) serta adanya perubahan tataguna lahan,yang mempengaruhi ketersediaan air baku dalam menunjang aktifitas sosial maupun ekonomi.Adapun mutu kualitas air sangat di pengaruhi oleh berbagai limbah rumah tangga, baik berasal dari limbah permukiman maupun industri yang berpotensi sebagai penurunan kualitas air.

Kondisi sungai secara fisik cenderung menurun dan belum seluruhnya dapat menampung debit air pada waktu-waktu tertentu, hal ini disebabkan oleh adanya penurunan kapasitas / debit sungai sehigga menimbulkan potensi daerah-daerah rawan banjir.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air antara lain mengatur tentang pengembangan sistem irigasi baik wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

4. Telekomunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika saat ini sudah cukup pesat. utama jasa pos pengiriman paket, surat dan barang – barang cetak.

Kapasitas telepon terpasang ada 1.952 SST (Saluran Sambungan Telpon). Namun dengan berkembangnya teknologi di bidang Telekomunikasi sebagian dapat dipenuhi oleh sambungan telpon selular baik GSM maupun CDMA.

5. Energi

Bidang ketenagalistrikan

Pada Tahun 2005 jaringan listrik di Kabupaten Karanganyar di salurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 KV yang selanjutnya didistribusikan melalui Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) ke wilayah-wilayah permukiman, perkantoran serta sentra perindustrian.

Daya yang terpasang untuk setiap rumah tangga mulai dari rumah tangga kecil dengan Tarif/Daya R-1: 450 VA sampai dengan 2200 VA, rumah tangga menengah R-2 : 2200 VA sampai dengan 6600 VA, serta rumah tangga besar R-3 di atas 6600 VA. Selain itu juga untuk peruntukan sosial (sekolah-sekolah, rumah sakit, tempat ibadah) disediakan dengan Tarif Sosial S-2 mulai daya 450 VA sampai dengan 200.000 VA. Sedangkan untuk kebutuhan Industri dan Bisnis, masing-masing tersedia tarif I dan tarif B. Tarif I-1/450 VA sampai dengan 14.000 VA, I-2/14000 VA sampai dengan 200.000 VA dan I-3 di atas 200.000 VA. Begitu pula tarif niaga (B) tersedia tarif usaha kecil B-1/450 VA sampai dengan B-1/2200 VA dan untuk niaga menengah dengan tarif B-2 di atas 2200 VA sampai dengan 200.000 VA

Pada Tahun 2005 daya yang disalurkan PLN berkisar 65% dari daya terpasang. Namun dengan pertumbuhan penyaluran listrik yang sangat tinggi mencapai 8% sampai dengan 10% per tahun, maka cadangan daya untuk 5 tahun ke depan perlu mendapatkan tambahan yang mencukupi kebutuhan sesuai dengan pertumbuhannya.

2.1.5. Politik dan Tata Pemerintahan

Pembangunan bidang politik merupakan bagian integral dari pembangunan. Kondisi politik yang stabil dan mantap akan menciptakan iklim kondusif bagi aspek pembangunan bidang lainnya.

Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan Pemilu Tahun 2004 dalam situasi yang kondusif. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih 473.510 orang dari 605.925 orang pemilih terdaftar atau sebesar 78,15%. Partisipasi dan kesadaran politik masyarakat perlu mendapatkan perhatian terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik.

Pengelolaan tata pemerintahan walaupun sudah diupayakan peningkatannya, akan tetapi kualitas pelayanan publik belum optimal.

2.1.6. Keamanan dan Ketertiban

Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat telah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. Keberhasilannya dirasakan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi serta budaya.

Meskipun kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat cukup kondusif, namun masih terdapat beberapa gangguan keamanan masyarakat, yang pada Tahun 2005 ditunjukkan oleh angka kriminalitas sebanyak 240 kasus.

2.1.7. Hukum dan Aparatur

1. Hukum

Dalam rangka implementasi otonomi daerah Pemerintahan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2001-2005 telah menerbitkan 63 Peraturan Daerah dan 2.056 Keputusan Bupati. Sedangkan permasalahan hukum yang sudah tertangani ada 12 kasus.

Tindak pidana yang sudah terselesaikan pada Tahun 2005 sebanyak 194 perkara, perdata 47 perkara dan pelanggaran lalu lintas 5.580 kasus.

2. Aparatur

Pemerintah Kabupaten Karanganyar berusaha menyelenggara rakan pemerintahan secara efektif dan efisien, melalui optimalisasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan kapasitas pemerintahan yang

sudah dan akan terus dilakukan antara lain terkait dengan peningkatan kelembagaan, pelayan publik, pengelolaan keuangan daerah, profesionalisme aparatur pemerintah serta pengembangan partisipasi masyarakat .

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2005 di dukung oleh 13.502 PNS yang masuk dalam keanggotaan KORPRI terdiri dari : golongan I = 2.367 orang; golongan II = 3.880 orang; golongan III = 6,509 orang dan golongan IV = 746 orang. Sedangkan untuk Aparat Pemerintahan Desa terdapat 162 Kepala Desa dan 2.102 orang perangkat Desa.

2.1.8. Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan

Terbatasnya sumber daya alam dan adanya perdagangan bebas maka perlu pemanfaatan ruang dengan semakin efisien. Meningkatnya dinamika dan aktifitas penduduk berpengaruh pada penurunan kualitas SDA. Dalam kondisi ini, ruang akan menjadi sesuatu yang strategis. Untuk itu pelaksanaan penataan ruang yang aman, nyaman dan produktif yang diimbangi dengan konsistensi dan berkelanjutan dalam pengendalian serta penegakan hukum merupakan tantangan ke depan yang harus dihadapi dan dipersiapkan bersama dengan seluruh Stake Holder. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang, maka tantangan yang dihadapi adalah kebutuhan akan lahan juga meningkat, sehingga masalah yang dihadapi pada bidang pertanahan adalah peningkatan pelayanan administrasi pertanahan yang berpihak pada keputusan masyarakat yang telah mulai dirintis saat ini melalui sistem manajemen pertanahan berbasis masyarakat.

1. Wilayah

Kabupaten Karanganyar secara administratif terdiri dari 17 Kecamatan dan 177 Desa dan Kelurahan. Kawasan yang sudah berkembang pesat adalah wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kota Surakarta dan di sekitar Kota Karanganyar. Wilayah pedesaan saat ini masih lebih berperan sebagai Hinterland dari perkotaan dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih

rendah dari pada perkotaan terutama wilayah perkotaan dengan daerah-daerah. Upaya pembangunan pedesaan dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang terutama infrastruktur pembagian kawasan agropolitan sudah mulai dilakukan dalam rangka mengurangi tekanan urbanisasi dan peningkatan sinergitas pembangunan desa – kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan agropolitan adalah wilayah Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu, Karangpandan, Matesih (Kawasan Agropolitan Sutho madansih).

2. Tata Ruang

Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 1999 tentang RTRW di Kabupaten Karanganyar Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang perubahan kesatu atas RTRW Kabupaten Karanganyar dengan jangka waktu 10 tahun (1999-2009). Tata Ruang sesuai dengan RTRW tersebut di atas Kabupaten Karanganyar terdiri 19.906 ha. (25,78%) sebagai kawasan lindung, 57.314 ha. (74,22%) sebagai kawasan budidaya.

Pertumbuhan penduduk di berbagai kawasan di Kabupaten Karanganyar telah mendorong berbagai pemenuhan akan ruang, khususnya untuk permukiman dan perumahan. Hal ini dapat mendorong berkurangnya lahan-lahan pertanian dan hutan beralih fungsi sebagai lahan-lahan untuk permukiman dan kegiatan budidaya lainnya. Kondisi tersebut memerlukan keseimbangan dan konsistensi terhadap pemanfaat ruang ke depan, sehingga beberapa aspek penataan ruang perlu mendapatkan perhatian untuk 20 tahun ke depan, antara lain peningkatan fungsi kawasan lindung, kawasan-kawasan rawan bencana alam, kawasan budidaya, kawasan berkembang pesat. Struktur ruang di Kabupaten Karanganyar terdiri dari kota-kota dan desa-desa sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan Perda

Nomor 2 Tahun 1999 tentang RT RW Kabupaten Karanganyar maka Karanganyar terdiri dari:

- a. SWP I terdiri dari Kecamatan Karanganyar, Tasikmadu, Mojogedang, yang dikembangkan pemerintahan, pendidikan, perumahan, kesehatan, perdagangan, peternakan dan pertanian.
- b. SWP II terdiri dari Kecamatan Jaten dan Kebakkramat, yang dikembangkan industri, perhubungan, perdagangan, peternakan dan pertanian.
- c. SWP III terdiri dari Kecamatan Karangpandan, Matesih dan Kerjo, yang dikembangkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan perdagangan.
- d. SWP IV terdiri dari Tawangmangu, Ngargoyoso dan Jenawi, yang dikembangkan pariwisata, pertanian dan hortikultura.
- e. SWP V terdiri dari Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo dan Jumantono yang dikembangkan pertanian tanaman pangan, peternakan, perdagangan, pengairan dan industri kecil.
- f. SWP VI terdiri dari Kecamatan Colomadu, yang dikembangkan pendidikan, perumahan, perhubungan, perdagangan dan perikanan.
- g. SWP VII terdiri dari Kecamatan Gondangrejo, yang dikembangkan industri, perumahan dan perhubungan.

3. Pertanahan

Dalam bidang pertanahan yang merupakan salah satu SDA yang harus dijaga dan ditata karena mempunyai nilai strategis kaitannya dengan fungsi pemanfaatannya, baik fungsi lindung dan fungsi budi daya. Akhir-akhir ini sering terjadi konflik pemanfaatan antara lain pemanfaatan fungsi lindung dan fungsi budidaya (perumahan, infrasment, industri), sawah menjadi non sawah.

2.1.9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Laju pembangunan pada lima tahun terakhir di samping berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat juga berdampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam

yang berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian serta kurangnya usaha konservasi sumber daya alam mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan. Guna menjaga kualitas lingkungan suatu wilayah, salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pengembangan kawasan konservasi, Perubahan luas hutan di Kabupaten Karanganyar dapat ditunjukkan melalui proporsi luas hutan (hutan rakyat dan hutan produksi) terhadap luas wilayah, pada tahun 2005 proporsinya sebesar 8,08%

Luas lahan kritis selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan, yaitu pada tahun 2001 seluas 28.709,64 ha dan pada tahun 2005 menjadi 23.934,64 ha. Upaya rehabilitasi di suatu kawasan berpacu dengan terjadinya kerusakan di kawasan lain. Rusaknya lahan akibat bencana alam di Kabupaten Karanganyar seluas 10 ha.

Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah yang sebagian besar lahannya (lebih dari 60 %) berada pada zona rentan bergerak longsor. Dari tingkat kerentanan menengah hingga tinggi. Hal ini disebabkan kondisi lahan yang miring cukup curam, mulai dari kemiringan 20 derajat hingga tegak. Lahan yang rentan tersebut merupakan lereng- lereng gunung dan perbukitan yang tersusun oleh batuan vulkanik berupa lava andesit dan breksi andesit. Hasil pemetaan geologi menunjukkan terdapat 7 lokasi rawan longsor yang tersebar di 5 Kecamatan. Sebagai langkah untuk peringatan dini terhadap bencana tanah longsor, Kabupaten Karanganyar telah mengambil langkah dengan menempatkan 1 orang petugas di masing- masing lokasi rawan longsor.

2.2. TANTANGAN

Banyak kemajuan yang telah dicapai namun banyak pula tantangan atau masalah yang belum terselesaikan. Sebagai konsekuensinya maka perlu upaya penanganan dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan, utamanya di bidang sosial budaya, ekonomi, kehidupan beragama, pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, keamanan dan ketertiban, hukum dan aparaturnya pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana prasarana serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

2.2.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Pembangunan kependudukan dan sumber daya manusia yang akan datang masih dihadapkan pada tingkat pertumbuhan, kualitas dan mobilitas penduduk. Untuk itu perlu pengelolaan yang benar tentang kependudukan yang mencakup pelayanan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pemerataan penyebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.

2.2.2. Ekonomi

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Karanganyar telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lapangan kerja yang memadai. Maka dari itu tantangan pembangunan ekonomi dua puluh tahun ke depan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampu meningkatkan pendapatan per kapita serta pemerataan, sehingga secara bertahap kesejahteraan masyarakat dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat minimal sesuai dengan Kabupaten/Kota se Propinsi Jawa Tengah.

Semakin intensifnya pasar bebas/globalisasi menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara kompetitif. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk lokal di pasar regional maupun global, tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa.

Meningkatnya jumlah penduduk, alih fungsi lahan, eksploitasi lahan secara berlebihan dan terjadinya bencana alam dapat mengganggu ketahanan pangan. Tantangan ke depan adalah mengantisipasi, mengendalikan dan mengurangi secara bertahap permasalahan-permasalahan tersebut di atas serta berupaya meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian secara berkelanjutan.

2.2.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dalam situasi dan kondisi yang ditandai oleh pesatnya kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan tengah berlangsungnya proses globalisasi, maka penguasaan IPTEK bagi Kabupaten Karanganyar mutlak diperlukan. Tujuan penelitian dan pengembangan disini terutama adalah untuk mencari terobosan-terobosan dalam memicu pembangunan di bidang IPTEK. Tantangan yang dihadapi dalam bidang IPTEK adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing untuk penerapan dan pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan IPTEK daerah menuju masyarakat dan aparatur pemerintahan daerah yang sadar akan pentingnya IPTEK perlu membangun dan menciptakan keterpaduan dalam pengembangan IPTEK yang melibatkan secara intensif para pelaku penelitian, baik dari perguruan tinggi, perusahaan, maupun pemerintah daerah maupun kerjasama penelitian dengan Kabupaten/Kota lain khususnya di wilayah SUBOSUKAWONO-SRATEN, hal ini terutama untuk menciptakan kontribusi IPTEK daerah dalam mengantisipasi berbagai persoalan dasar yang ada di Kabupaten Karanganyar.

2.2.4. Sarana dan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman pada kurun waktu 20 tahun kedepan ketersediaanya harus mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat baik dikawasan perkotaan maupun pedesaan

Memenuhi tuntutan kebutuhan hunian di perkotaan dan pedesaan guna mewujudkan perkotaan dan pedesaan yang bersih dan nyaman sebagai tempat tinggal merupakan tantangan dalam penyediaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan sesuai dengan komitmen *Millinium Development Goal (MDG)*.

Tantangan yang berat juga dihadapi dalam pembangunan sarana prasarana sumber daya air dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan memenuhi pasokan air baku yang semakin meningkat tantangan tersebut meliputi kemampuan menjaga kondisi mantap terhadap prasarana sumber daya air dan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan masyarakat pelestarian dan pengembangan sumber-sumber air dan penampungan air, pengendalian daya rusak air serta terwujudnya kemampuan kelembagaan pengelolaan sarana prasarana sumber daya air. Keterkaitan yang sangat erat pengelolaan irigasi dengan ketersediaan pangan merupakan hal yang tidak bisa di tawar lagi. Untuk itu perlu dibangun sistem irigasi yang baik untuk mendukung struktur pertanian menuju kemandirian pangan di Kabupaten Karanganyar.

2.2.5. Politik dan Tata Pemerintahan

Perkembangan dalam bidang politik dan tata pemerintahan seiring dengan makin meningkatnya kesadaran politik dan implementasi, kebijakan desentralisasi menjadi fokus perhatian bagi pemerintahan maupun masyarakat. oleh karena itu, tantangan yang dihadapi di bidang politik dalam pelaksanaan desentralisasi di berbagai bidang adalah peningkatan kedewasaan berpolitik bagi masyarakat dan pengembangan budaya politik; sehingga mampu mendorong demokrasi yang lebih transparan dan lebih bertanggung jawab non diskriminatif serta mampu menciptakan iklim yang kondusif dengan didukung oleh tata pemerintahan yang baik.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan menguatnya pelaksanaan desentralisasi maka tuntutan terhadap kinerja pelayanan publik yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat serta pelaksanaan asas dan norma tata pemerintahan yang baik, menjadi tantangan di masa depan guna memenuhi tingkat kepuasan masyarakat .

Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan dihadapkan pada tata pengelolaan pemerintahan desa yang partisipatif, sehingga memberikan akses bagi masyarakat pedesaan dalam proses pembangunan desa.

2.2.6. Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban Nasional akan berpengaruh terhadap daerah. Tantangan yang dihadapi dalam bidang keamanan dan ketertiban ke depan adalah mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan kondusivitas wilayah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Kesadaran masyarakat yang tanggap terhadap potensi ancaman dan gangguan Kamtibmas perlu ditingkatkan bersama, dalam rangka kemandirian masyarakat untuk mengelola keamanan dan ketertiban.

2.2.7. Hukum dan Aparatur

Tantangan yang dihadapi dalam hukum adalah penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Di samping itu, peningkatan jaminan akan kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum serta harmonisasi produk hukum daerah.

Tantangan dalam bidang aparatur pemerintah sebagai pelayanan masyarakat, ke depan adalah terciptanya aparatur yang mampu bekerja secara transparan, akuntabel dan melaksanakan pelayanan prima kepada publik sesuai dengan tuntutan masyarakat yang makin maju dan demokratis.

2.2.8. Wilayah dan Tata Ruang

Meningkatnya dinamika dan aktivitas penduduk sejak pelaksanaan Otda dan pengaruh arus perdagangan bebas, maka akan terjadi penurunan kualitas sumber daya alam. Dalam kondisi seperti ini ruang akan menjadi komoditi yang sangat strategis. Untuk itu pelaksanaan penataan ruang yang

aman, nyaman produktif dan berkelanjutan merupakan tantangan ke depan yang harus dihadapi dan di persiapkan bersama dengan seluruh *stake holders*. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang maka kebutuhan akan lahan juga meningkat pula, sehingga tantangan yang di hadapi pada bidang pertanahan adalah peningkatan pelayanan administrasi pertanahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang telah mulai dirintis saat ini melalui sistem manajemen pertanahan berbasis masyarakat

2.2.9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Laju pembangunan lima tahun terakhir selain berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan rakyat juga berdampak negatif terhadap fungsi lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian serta kurangnya konservasi sumber daya alam, mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, meningkatnya pemanasan global serta meningkatnya potensi kejadian bencana longsor, banjir dan kekeringan.

Eksploitasi air bawah tanah secara besar-besaran dan penambangan golongan "C" yang tidak terkendali saat ini masih sering terjadi. Kondisi kemiskinan dan terbatasnya pilihan lapangan kerja, berakibat pada tidak pedulinya sebagian masyarakat akan pentingnya kelestarian alam. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas sumber daya.

Pengeboran dan kawasan air bawah tanah/eksploitas air tanah secara besar- besaran oleh industri dan hotel akan menyebabkan penurunan air tanah. Selain itu akibat paling nyata dari eksploitas air tanah secara berlebihan adalah penurunan permukaan tanah (*Land Subsidence*), sehingga tantangan yang dihadapi adalah mewujudkan regulasi dan pengawasan dalam pengambilan air tanah.

2.3. MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan yang secara riil maupun potensian dimiliki dan dapat didaya gunakan oleh daerah untuk pembangunan daerah.

1. Karanganyar, secara geografis memiliki letak yang strategis, karena berada pada wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN yang merupakan wilayah regional yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang pesat. Karanganyar juga terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, hal ini berarti Karanganyar sebagai pintu gerbang aktivitas Jawa Timur ke Jawa Tengah, meskipun pada saat ini belum optimal. Tentu saja harapan 20 tahun mendatang sesuai dengan RPJP Kabupaten Karanganyar, potensi sebagai pintu gerbang dapat berkembang.
2. Dari aspek Geomorfologi dan Lingkungan Hidup, yaitu adanya areal lahan pertanian dan perkebunan yang cukup potensial, tersedianya sumber air yang cukup, tersedianya kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan rakyat. Dengan tersedianya potensi tersebut Kabupaten Karanganyar mempunyai harapan untuk mengembangkannya baik untuk meningkatkan produktifitas maupun untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
3. Jumlah penduduk Karanganyar yang cukup besar dan tersedianya penduduk usia produktif yang siap memasuki dunia kerja, hal ini memberi harapan besar merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat menjadi modal dasar pembangunan bilamana kualitasnya dapat ditingkatkan.
4. Kekayaan budaya Karanganyar antara lain seperti kelembagaan lokal, norma dan kepercayaan yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat Karanganyar sejak Kasunanan/ Mangkunegaran hingga saat ini merupakan modal dasar yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis budaya lokal.

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI DAN MISI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 5 ayat 3 dinyatakan bahwa RPJP daerah Kabupaten / Kota memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah. Sedangkan Pengertian Visi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Adanya rumusan Visi dimaksudkan untuk mewujudkan suatu sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto, namun visi merupakan suatu cita-cita atau harapan yang diyakini dapat diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, yang dalam dokumen RPJP mempunyai jangka waktu selama 20 tahun.

Rumusan visi Kabupaten Karanganyar yang paling awal ditemukan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah (tahun 1994/1995 s.d. 1998/1999) Kabupaten Karanganyar **“Kabupaten DATI II Karanganyar 2018 sebagai daerah yang maju, adil, makmur dan mandiri dalam suasana tenteram dengan industri, pertanian dan pariwisata yang handal didukung oleh SDM yang menguasai Iptek dan berjiwa imtaq serta berkepribadian bangsa”**.

Kemudian pedoman dasar (Motto) Karanganyar TENTERAM terdapat dalam pola dasar pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar tahun 1994–1997, yang telah dijabarkan dalam Keputusan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Dasar Karanganyar TENTERAM. Pengertian Karanganyar **TENTERAM** adalah merupakan bentuk akronim sebagai kependekan dari **Tenang, Teduh, Rapi,**

Aman dan Makmur. Kemudian pada masa memasuki krisis Ekonomi pada tahun 1998 / 1999 semua Pemerintah Daerah wajib menyusun Pedoman Pokok–Pokok Reformasi. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam **Pokok-Pokok Reformasi** adalah sebagai berikut : **”Visi pembangunan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah yang maju, adil, makmur, berketahanan dan mandiri dalam suasana tenteram dengan industri, pertanian dan pariwisata yang handal, didukung oleh masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, berbudi luhur, demokratis, bersatu padu serta berkepribadian bangsa”**.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada Kabupaten, maka Kabupaten Karanganyar di dalam Pola Dasarnya memiliki visi (tahun 2000-2005) yang masih sama dengan visi sebelumnya yaitu **”Kabupaten Karanganyar sebagai daerah yang maju, adil, makmur, berketahanan dan mandiri dalam suasana tentram, dengan industri pertanian dan pariwisata yang handal, didukung oleh masyarakat yang sehat jasmani dan rohani berbudi luhur, demokratis bersatu padu serta berkepribadian bangsa”**.

Sasaran dari visi pembangunan daerah ini adalah :

- a. Optimalisasi potensi Sumber Daya Manusia.
- b. Peningkatan potensi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Karanganyar
- d. Peningkatan potensi pembiayaan dan pendapatan daerah.
- e. Optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Karanganyar.

Kemudian visi pemerintah Kabupaten Karanganyar yang tercantum dalam **PROPEDA** tahun 2004-2008 dan **RENSTRA** Kabupaten Karanganyar tahun 2005-2009 yang prinsipnya masih tetap sama dengan visi sebelumnya yaitu

”Terwujudnya Karanganyar sebagai daerah yang maju, adil, makmur dan mandiri dalam suasana tenteram dengan industri, pertanian dan pariwisata yang handal, yang didukung oleh masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, demokratis, berbudi luhur dan berkepribadian bangsa”.

Sementara itu, mengenai Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 adalah **“Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis serta aman dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Kemudian Visi Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam RPJP Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 yaitu : **”Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari”**.

Sebelum merumuskan Visi Pembangunan Daerah, terlebih dahulu akan ditampilkan kondisi *eksisting* yang dominan yang muncul di tingkat Kabupaten Karanganyar untuk masa 20 tahun mendatang antara lain :

- 1) Sebagian besar masyarakat Kabupaten Karanganyar memiliki mata pencaharian pertanian. Gejolak harga komoditas pertanian yang sering terjadi, dimana harga komoditas menjadi rendah pada musim panen, namun tidak pernah mengalami peningkatan pada musim produksi karena dibukanya kran *import* bahan pangan oleh pemerintah, membuat pendapatan masyarakat petani tetap relatif rendah.
- 2) Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik yang perijinan maupun yang non perijinan.
- 3) Masih rendahnya kemampuan daya beli masyarakat, karena masih cukup banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

- 4) Masih sering terjadi bencana alam, berupa : tanah longsor dan angin ribut serta banjir di sebagian wilayah di Kabupaten Karanganyar.
- 5) Dalam 20 tahun mendatang, Karanganyar akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global yang makin meningkat, jumlah penduduk yang makin banyak dan dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam.
- 6) Dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan daya saing suatu bangsa sehingga mutlak diperlukan suatu kemampuan untuk mengakses informasi.
- 7) Kasus-kasus pencemaran lingkungan cenderung akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan sekitarnya, perubahan gaya hidup yang konsumtif serta rendahnya masyarakat akan keselamatan lingkungan hidup dan semakin meningkatnya jumlah industri yang masih kurang memperhatikan Analisa Dampak Lingkungan.
- 8) Kesadaran menunaikan ibadah keagamaan berkembang dengan baik. Demikian pula telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan *intern* dan umat beragama yang aman, damai dan saling menghargai.
- 9) Pemberdayaan perempuan telah menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan program-program pembangunan yang makin responsif gender serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- 10) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan semakin lajunya perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga semakin menguatnya tuntutan untuk segera mewujudkan adanya kepastian hukum.

- 11) Masih banyak lembaga pendidikan yang belum terwujud sebagai lingkungan pengembang iptek dan imtaq terhadap peserta didik yang mampu bersaing di era global untuk menuju masyarakat madani.
- 12) Ditetapkannya Karanganyar sebagai kawasan pembatasan strategis dan strategis pertumbuhan yang diarahkan untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan wilayah, dengan berdasarkan pada kondisi wilayah potensial, permasalahan dan kegiatan-kegiatan pada kondisi wilayah potensi, permasalahan dan kegiatan-kegiatan yang diperkirakan akan berkembang di wilayah tersebut.
- 13) Masih belum optimalnya penghayatan dan pengamalan Pancasila, sehingga banyak terjadi gejolak sosial dan politik yang mengarah pada dekadensi moral serta disintegrasi bangsa dan negara.

Berdasarkan kondisi dan potensi saat ini sebagaimana diuraikan di atas, serta tantangan yang dihadapi dalam dua puluh tahun mendatang, maupun posisi Karanganyar dalam konstelasi Propinsi Jawa Tengah khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia umumnya, dan mempertimbangkan Visi Propinsi Jawa Tengah maupun Visi Nasional, maka visi pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut :

“Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera dan bermartabat ”

Visi yang merupakan cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Karanganyar tersebut harus dapat diukur guna mengetahui tingkat daya saing, kemajuan, kesejahteraan, dan tingkat keberbudayaan yang ingin dicapai. Dengan demikian kiranya perlu untuk diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan pemahaman tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, agar semua pihak yang berkepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencapaiannya.

Karanganyar.

Karanganyar diartikan sebagai suatu daerah otonom yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas– batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Tengah maupun dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom (atau selanjutnya disebut daerah) menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Maju

Masyarakat Karanganyar yang maju merupakan kondisi masyarakat yang berbeda pada masyarakat peradaban yang tinggi dengan ditopang kemampuan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Penguasaan IPTEK akan tercermin pada semakin berkembangnya pemanfaatan iptek dalam kegiatan dunia usaha seperti berkembangnya sektor industri, pertanian dan jasa. Kemajuan masyarakat juga tercermin pada meningkatnya kemakmuran, derajat pendidikan, derajat kesehatan, terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya sikap demokrasi, sikap politik masyarakatnya. Dengan demikian membangun kemajuan masyarakat Karanganyar terkait erat dengan pembangunan ekonomi, politik, pendidikan, iptek, kesehatan, transportasi dan kependudukan.

Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi yang maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya Manusia, dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan serta pelayanan masyarakat yang semakin meningkat dan merata.

Dampak kemajuan itu dapat diidentifikasi oleh semakin berkurangnya kesenjangan antar wilayah, tiadanya lagi daerah terpencil, dan meningkatnya iklim kehidupan yang demokratis, serta meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah.-

Berdaya Saing

Pengertian berdaya saing adalah kemampuan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk berdaya saing, masyarakat dipersyaratkan memiliki potensi yang memperlihatkan keunggulan daerah dalam menghadapi persaingan lokal, regional dan global di segala bidang.

Oleh karena itu, mewujudkan masyarakat Karanganyar yang berdaya saing berarti mewujudkan masyarakat Karanganyar yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif. Kemampuan berdaya saing masyarakat Kabupaten Karanganyar harus tercermin pada: (1) Ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, berpikir global, dan mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunan daerah; (2) Penguatan perekonomian domestik berbasis potensi dan keunggulan komperatif dan kompetitif di seluruh wilayah; (3) Pembangunan infrastruktur yang maju dan berwawasan lingkungan; dan (4) Reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

Sejahtera.

Artinya bahwa tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, yakni kondisi kehidupan dimana aspek kebutuhan material dan spiritual dapat terpenuhi secara optimal, adil dan merata. Aspek kebutuhan material meliputi minimal kebutuhan dasar atau sandang, pangan, dan papan. Sementara aspek kebutuhan spritual mencakup minimal kebutuhan dasar untuk menjalankan ibadah dan melaksanakan ajaran agama yang dipeluk,

kebutuhan rasa aman dan bebas dari rasa takut dan terpenuhinya kebutuhan sosial yang berkeadilan.

Beberapa indikator sebagai ukuran meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pendapatan per kapita ke tingkat yang optimal, menurunnya angka pengangguran dan angka kemiskinan ke tingkat minimal, turunnya angka kriminalitas, meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya perlindungan anak dan kesejahteraan sosial, terwujudnya keluarga kecil berkualitas, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, terwujudnya pemuda yang berkualitas, meningkatnya kualitas kehidupan beragama.

Bermartabat.

Artinya adalah bahwa masyarakat Karanganyar yang akan dituju adalah masyarakat yang bermartabat. Artinya masyarakat yang memiliki harga diri yang terhormat. Hal ini berarti masyarakat tersebut memiliki orientasi nilai moral yang tinggi dengan selalu mengutamakan nilai religius dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah perbuatannya, sehingga mewujudkan sebagai suatu masyarakat yang beradab. Masyarakat yang demikian merupakan masyarakat yang memiliki jati diri yang berpegang pada nilai-nilai luhur Pancasila dan warisan budaya masyarakat. Pegangan nilai-nilai luhur tersebut termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk menjunjung tinggi, menjadikan pedoman dan menerapkan nilai-nilai tersebut, yakni nilai religius dan nilai-nilai kegotong royongan atau kerukunan, nilai hormat atau "*tepo sliro*", dan nilai keindahan. Dengan berpegang pada nilai-nilai tersebut berarti dalam hidup dan kehidupan setiap warga masyarakat akan selalu menjauhkan diri dari tindak kekerasan, kekacauan, pemaksaan kehendak, dan pengrusakan.

Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengukur masyarakat yang bermartabat adalah : semakin meningkatnya jiwa dan semangat kerukunan atau kegotong-royongan para warga masyarakat, berkembangnya sistem ketokohan

yang patut menjadi keteladanan, meningkatnya jiwa dan semangat masyarakat atas penghargaan dan penghayatan norma seni dan keindahan, terutama seni tradisional, meningkatnya jiwa dan rasa kemanusiaan sebagai dasar pertimbangan dalam berpikir, bersikap, dan berbuat menyangkut segala hal, serta semakin meningkatnya implementasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan masyarakat Karanganyar yang berkualitas unggul.
 - SDM berkualitas unggul mencakup kualitas unggul dalam segi moral, intelektual, emosional, sosial, dan fisik yang dilandasi dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, meningkatnya akhlak mulia, karakter, dan sikap tangguh masyarakat dalam hidup dan kehidupannya, dan bertumpu pada falsafah moral Pancasila dalam seluruh sendi kehidupannya.
 - Masyarakatnya cerdas yang ditandai oleh indikator-indikator: responsif terhadap situasi yang dihadapi, pintar dalam memahami persoalan, tepat dalam memilih upaya pengatasan masalah dan bijak dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian diharapkan untuk jangka waktu (20 tahun) Kabupaten Karanganyar mampu mewujudkan masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif.
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang bertumpu pada potensi unggulan daerah dengan dukungan teknologi maju dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

- Wujud pengembangan perekonomian daerah ditandai antara lain dengan indikator-indikator meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat sehingga pendapatan per kapita masyarakat meningkat ke tingkat yang optimal, meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
 - Pengembangan perekonomian daerah yang bertumpu pada potensi unggulan diwujudkan dengan meningkatnya produk-produk unggulan daerah yang dikembangkan dari potensi unggulan dan andalan daerah sehingga mampu bersaing dalam kancah global, semakin meningkat dan berkembangnya jenis dan bentuk diversifikasi pertanian dalam arti luas sebagai penghasil komoditas seperti agribisnis tanaman obat, tanaman hias, dan sejenisnya yang mampu bersinergi dengan pengembangan industri dan pariwisata daerah.
3. Mewujudkan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- Otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik itu ditandai dengan terwujudnya kehidupan politik dan tata pemerintahan yang demokratis, bertanggung jawab dan bermartabat.
 - Perwujudan *good governance* itu antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja aparat pemerintahan daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik yang sesuai standar mutu pelayanan, meningkatnya sistem dan Iklim Demokrasi yang semakin mantap terbebas dari adanya praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan semakin menguatnya kelembagaan politik dan Pemerintahan Daerah yang mampu mengakomodasikan tuntutan perubahan serta mampu meningkatkan hubungan kerja maupun kerjasama baik antar daerah tingkat lokal, tingkat nasional maupun tingkat internasional.

4. Mewujudkan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas.
 - Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai itu dimaksudkan untuk menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi daerah,
 - Wujud tersedianya sarana dan prasarana yang memadai itu antara lain ditandai dengan semakin terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni, meratanya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik di seluruh wilayah sehingga tiada lagi wilayah daerah yang disebut terpencil atau terisolir.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, bersatu, dan bermartabat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - Wujud kehidupan masyarakat yang sejahtera itu antara lain ditandai dengan semakin berkurangnya kualitas dan kuantitas para penyandang masalah sosial, berkurangnya tingkat kemiskinan hingga pada titik terendah jumlah penduduk miskin, menurunnya angka pengangguran sampai pada tingkat terendah jumlah pengangguran terbuka.
 - Wujud kehidupan masyarakat yang bersatu dan bermartabat antara lain ditandai dengan berkurangnya angka kriminalitas maupun pelanggaran hukum lainnya, meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta meningkatnya keamanan dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh adanya kepastian hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia.
6. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang optimal / lestari dengan tetap menjaga kelestarian eksistensi lingkungan yang harmonis dan kompetitif.

- Wujud pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup yang optimal itu antara lain ditandai dengan meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, meningkatnya pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam.
- Optimalisasi dan pelestarian SDA dan Lingkungan itu dimaksudkan guna mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah, dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berupaya mengantisipasi dan mencegah terjadinya bencana alam serta menanggulangi resiko yang ditimbulkan.

BAB IV

ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

4.1. Sasaran Pokok Pembangunan

Untuk mencapai tingkat kesejahteraan, kemajuan dan kelestarian yang diinginkan, arah pembangunan daerah jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun di Kabupaten Karanganyar mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

4.1.1. Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dalam Mendukung Keberadaan Masyarakat Karanganyar yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, dan Bermartabat, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Karanganyar diarahkan pada peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, peningkatan relevansi daya saing dan peningkatan pencitraan tata kelola pendidikan.
2. Peningkatan kemampuan akualifikasi ademis, yang ditujukan pendidikan yang standar profesionalisme dan peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pemerataan distribusi guru, serta tenaga kependidikan lainnya.

3. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sebagai upaya pemenuhan sekolah standar nasional dan sekolah standar nasional bertaraf internasional, melalui pembangunan / penyediaan dan peningkatan fasilitas pendidikan.
4. Peningkatan dan pengembangan sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja mandiri antara lain untuk mewujudkan Karanganyar sebagai Kabupaten Vokasi.
5. Penuntasan buta aksara dan wajib belajar melalui program kejar Paket A, B, dan C juga perlu terus dikembangkan, sehingga Wajar didas dan penuntasan latin dan aksara 9 tahun betul-betul dapat diwujudkan.
6. Pengembangan pendidikan non formal dan jaminan pendidikan bagi warga yang kurang mampu dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan pencari kerja sesuai perkembangan iptek dengan mengupayakan lapangan kerja bagi yang kurang mampu.
7. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, pencegahan dan penanggulangan berbagai penyakit menular termasuk HIV /AIDS, serta kasus kekurangan gizi dan protein, peningkatan mutu tenaga kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan serta penambahan sarana dan prasarana di puskesmas dan posyandu yang tersebar di berbagai daerah.
8. Pembangunan pemuda diarahkan pada terwujudnya pengembangan sikap dan perilaku pemuda yang beriman dan bertaqwa, mandiri, inovatif dan kreatif, peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.
9. Pembangunan olah raga diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan budaya berolah raga bagi masyarakat, dengan harapan terwujudnya kebidupan yang sehat disamping mengembangkan secara

simultan pengembangan olah raga prestasi melalui pengembangan sarana prasarana olah raga yang memadai.

10. Peningkatan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dan mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling percaya dan menciptakan harmonisasi antar kelompok umat beragama yang penuh toleransi dan tenggang rasa.

4.1.2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Maju dan Ber-kembang dengan Bertumpu pada Potensi Industri, Pertanian dan Pariwisata dengan Tetap Mengedepankan Keberpihakan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan Kabupaten-Kabupaten yang maju di Indonesia.
2. Meningkatnya struktur perekonomian daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata, didukung dengan sektor ekonomi lain yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu.

3. Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat.
4. Meningkatnya perkembangan perindustrian, perdagangan dan pariwisata, agrobisnis dan industrialisasi pedesaan serta sektor usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan pengelolaan area pemakaman tokoh-tokoh terkenal sebagai aset wilayah ziarah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan wisata ziarah pada area pemakaman para tokoh.
6. Meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah.
7. Perekonomian daerah dikembangkan ke arah perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi lokal yang memperhatikan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan, membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi yang kokoh.
8. Perekonomian daerah dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat, mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.
9. Kelembagaan ekonomi dibangun dan dikembangkan guna menciptakan regulasi dan perijinan yang efisien, efektif dan non-diskriminatif, menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen, mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi di daerah, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam negeri.

10. Jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan di tingkat pedesaan dengan pengembangan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan pedesaan dalam pengembangan kegiatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan di pedesaan.
11. Pengembangan sektor-sektor strategis didayagunakan un-tuk memperkuat perekonomian daerah. Sistem agrobisnis dan agroindustri diperkuat sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
12. Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor-sektor pertanian ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi daerah. Hal ini merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan pedesaan, pengentasan keMiskinan dan keterbelakangan dan penguatan ketahanan Negara.
13. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada perluasan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan pekerja serta kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha (*entrepreneur*) sehingga mampu bersaing di era global.
14. Pengembangan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tuntutan pasar, serta pengembangan dan peningkatan balai-balai latihan kerja daerah.
15. Pembangunan UMKM dan koperasi diarahkan untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha, mengembangkan rumpun industri, mempercepat alih teknologi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

16. Pengembangan investasi dengan meningkatkan pelayanan kepada pihak swasta yang akan menanamkan modalnya di daerah dengan penyediaan informasi yang dibutuhkan, memfasilitasi kerjasama usaha, percepatan waktu pelayanan dan peningkatan sarana dan prasarana investasi seperti listrik dan air bersih serta perbankan.
17. Terwujudnya arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang tersebut diperlukan strategi dalam upaya pendanaan dengan cara peningkatan PAD, peningkatan perluasan kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga/ investor, peningkatan kinerja usaha BUMD, peningkatan sumber-sumber keuangan daerah lainnya yang syah.

.1.3 Terwujudnya Otonomi Daerah Bersendikan Tata Pemerintahan yang Baik, Demokratis dan Bertanggung Jawab, serta Profesionalisme Aparatur, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sistem perencanaan daerah, pelaksanaan dan evaluasi serta pengendalian pembangunan daerah dan pengawasan.
2. Peningkatan kemitraan dalam rangka perencanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan daerah.
3. Dalam mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis pada aspirasi masyarakat, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi dari Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sehingga pelayanan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan yang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Disamping itu, perlu adanya pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang mumpuni dan bersih, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana pelayanan secara memadai dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik.

4. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Pengelolaan keuangan daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan volume perputaran keuangan di daerah dan terwujudnya optimalisasi fungsi lembaga pengelolaan keuangan daerah.
5. Penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah sesuai kewenangan yang dimiliki serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan Pemda, untuk menghindari lahirnya produk yang memberatkan masyarakat untuk mewujudkan peraturan perundangan daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan.
6. Peningkatan kerjasama antar daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya *in-efisiensi* dalam pelayanan publik. Pembangunan kerjasama antar daerah melalui sistem jejaring antar daerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, berbagi keuntungan dari kerjasama, maupun berbagi tanggungjawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana maupun dalam pembangunan lainnya.
7. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk memberdayakan masyarakat desa karena pemberdayaan tersebut bersifat strategis dan dilakukan melalui penyiapan landasan berupa institusi masyarakat yang memperkuat perkembangan masyarakat di masa mendatang dan memberdayakan masyarakat yang

berbasis komunitas desa untuk mengatasi masalah yang ada dengan melaksanakan kegiatan yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

8. Pembangunan aparatur diarahkan untuk mewujudkan sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendorong pola pengembangan karir yang menuju pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur, dan peningkatan kesejahteraan aparatur termasuk perangkat desa. Disamping itu, secara bertahap juga dilakukan perubahan terhadap mental dan budaya birokrasi agar cepat dan tanggap dalam merespon tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan kuantitas pelayanan publik.
9. Pengembangan kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan pada kajian dan analisis yang mendalam disertai dengan dukungan data dan informasi yang aktual, valid dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pembangunan statistik akan dimulai dengan menata kewenangan dan kelembagaan statistik daerah, diikuti dengan pengembangan pusat data statistik daerah yang terintegrasi dengan pusat, *updating* secara ketat setiap data dan informasi yang berada pada tingkat sektoral sehingga bermanfaat bagi perumusan indikator pembangunan daerah yang terimplementasi secara berkelanjutan.
10. Penataan kelembagaan kearsipan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pembangunan sistem kearsipan daerah, pengembangan prasarana dan sarana pendukung kearsipan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan.
11. Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
12. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang memadai melalui pembangunan dan pengembangan beberapa Sistem Informasi

Manajemen di masing-masing Satuan Kerja yang nantinya akan diintegrasikan melalui jaringan intranet maupun internet.

4.1.4. Terwujudnya Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, yang ditandai dengan hal-hal sbb :

1. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
2. Pembangunan perumahan dan pemukiman diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan pemukiman dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, beserta peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat. Dalam mendukung pemenuhan lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat diberikan fasilitasi pembiayaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan pemukiman, terutama di daerah perkotaan.
3. Meningkatkan kualitas dan kelengkapan fasilitas kebersihan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kebersihan dan kelengkapan fasilitas kebersihan di kawasan perumahan dan pemukiman serta lingkungan lainnya.
4. Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
5. Penyediaan dan pengembangan berbagai fasilitas perhubungan yang menunjang kelancaran pembangunan ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas / kegiatan, pengembangan akses transportasi darat ke seluruh pelosok wilayah

dalam rangka mendukung pembangunan sektoral dan regional dan pelayanan mobilitas barang dan jasa demi tercapainya pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan lebih diarahkan kepada kawasan-kawasan sentra industri.

6. Pembangunan sumber daya air diarahkan guna mencapai kelestarian ketersediaan air diwujudkan dengan kegiatan pembangunan waduk, waduk lapangan (embung) bendungan, pompa air, jaringan drainase, ditunjang oleh kelestarian pengelolaan jaringan air yang meliputi: operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi; kesemuanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan petani,
7. Meningkatkan pelayanan penerangan jalan umum pada daerah strategis.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
9. Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan guna pengembangan wilayah Kabupaten Karanganyar.
10. Meningkatkan penataan *open space* sebagai area rekreasi, olah raga dan ruang komunal bagi masyarakat di lingkungan pemukiman.
11. Pembangunan air minum diarahkan pada meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Karanganyar terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum, meningkatnya kinerja pengelola air minum atau BUMD pengelola air minum melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk pemenuhan air minum diantisipasi tingkat kebocoran baik teknis dan non teknis hingga mencapai ambang batas normal.
12. Pembangunan kelistrikan diarahkan pada pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah dan peningkatan kemampuan pelayanannya. Peningkatan kemampuan kebutuhan listrik ini dapat dilakukan dengan mencari sumber-sumber baru di wilayah potensial untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau sinar matahari termasuk penggunaan *Mikrohidro* (pembangkit listrik mini) terutama di wilayah pedesaan. Disamping itu pembangunan kelistrikan juga diarahkan dengan membangun jaringan distribusi listrik sampai pelosok pedesaan

sehingga diharapkan terjadi peningkatan kemampuan jangkauan pelayanan kebutuhan listrik baik untuk kepentingan industri maupun untuk kepentingan rumah tangga dapat terwujud secara lebih merata.

13. Penanganan persampahan dan drainase pada permukiman diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan dan pelayanan persampahan, drainase dan pemakaman umum serta memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan persampahan, tidak hanya di bidang transportasinya tapi juga dalam pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA).
14. Pembangunan penataan ruang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan seimbang. Rencana pembangunan dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya.
15. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi.
16. Pembangunan kota diseimbangkan pertumbuhannya dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional. Upaya itu diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali, serta untuk mengendalikan arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kota besar, dengan cara menciptakan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha di kota-kota menengah dan kecil.

17. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan (a) kompetensi Sumber Daya Manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

4.1.5. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera, Aman dan Damai dengan Kepastian Hukum dan Penegakan HAM serta Kesetaraan Gender, yang Ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) terutama bagi keluarga Miskin serta peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi, peningkatan pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja, penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja.
3. Meningkatkan pembudayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan tumbuh kembang anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

4. Menguatkan kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerja sama dengan masyarakat luas dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.
5. Memberdayakan keluarga menuju keluarga sejahtera yang mandiri. Sasaran kebijakan ini adalah terwujudnya keluarga sejahtera yang mandiri.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Keluarga Berencana agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
7. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa secara keseluruhan.
8. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui dua cara. Pertama, mengurangi beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin. Kedua, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya.
9. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada memperkuat kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik untuk memberikan lebih besar peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.
10. Meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang. Sasaran kebijakan ini adalah terwujudnya kesejahteraan sosial keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang.

11. Pengembangan kepedulian bagi panti sosial, anak terlantar, orang terlantar dan penyandang cacat.
12. Meningkatkan pembangunan perlindungan dan pelayanan sosial anak-anak dan keluarga. Sasaran kebijakan ini adalah terwujudnya perlindungan sosial bagi anak-anak dan keluarga.
13. Meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, korban narkoba dan kelompok Miskin serta masyarakat rentan sosial ekonomi lainnya. Sasaran kebijakan ini adalah terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan bagi anak-anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, korban narkoba, dan kelompok Miskin serta masyarakat rentan sosial ekonomi lainnya.
14. Pemantapan dan peningkatan manajemen pelayanan sosial anak-anak dan keluarga. Sasaran kebijakan ini adalah terselenggaranya pelayanan sosial yang berkualitas bagi anak-anak dan keluarga.
15. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak azasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia.
16. Memelihara kondisi keamanan ketertiban yang cukup kondusif di daerah dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan.

4.1.6. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan kompetitif, yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaga fungsi,

daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.

2. Meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan Sumber Daya Alam (untuk tanaman hias dan tanaman obat) guna mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindungnya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran.
4. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam.
5. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem dalam artian tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. Pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan daya dukungnya dan memperhatikan daya regenerasinya khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*).
6. Dalam perspektif pembangunan yang berkelanjutan, potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Dengan demikian Sumber Daya Alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan.
7. Meningkatkan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas serta sistem politik yang kredibel dalam pengendalian silang pendapat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup dan menjalin kerjasama secara kemitraan antara lembaga, masyarakat dan instansi lain yang terkait.
8. Meningkatkan kelembagaan pengelola dan kualitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparat atau sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup.

9. Mengelola Sumber Daya Alam Tak Terbarukan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam serta Sumber Daya Alam Tak Terbarukan.
10. Mengembangkan Sumber Daya Alam Tak Terbarukan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam terbarukan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.
11. Mengendalikan pencemaran lingkungan hidup, Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan pencemaran dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Mitigasi Bencana Alam sesuai dengan kondisi geologi Kabupaten Karanganyar. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini terhadap bencana alam.
13. Menjaga dan melestarikan Sumber Daya Air. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan alam guna melestarikan Sumber Daya Air.
14. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai Lingkungan Hidup. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan peduli terhadap isu Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
15. Meningkatkan pengelolaan area pemakaman. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan area pemakaman.
16. Meningkatkan pemeliharaan kebersihan lingkungan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemeliharaan kebersihan di kawasan perumahan dan pemukiman serta lingkungan lainnya.
17. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan fungsi pertamanan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan arti penting pertamanan baik di lingkungan perkotaan maupun di desa.
18. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dan diikuti dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Untuk itu

diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan hukum sebagai pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.

4.2. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Untuk mencapai visi Pembangunan Daerah yang telah ditentukan, arah Pembangunan Daerah Jangka Panjang selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang adalah sebagai berikut :

4.2.1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dalam Mendukung Keberadaan Masyarakat Karanganyar yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat dan Bermartabat, melalui :

1. Pembangunan pendidikan Kabupaten Karanganyar difokuskan pada peningkatan, pemerataan dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
2. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas untuk menuju standar nasional dan internasional.
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan dan mutu terhadap pelayanan kesehatan.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, mutu tenaga kesehatan dan perbaikan manajemen kesehatan.
5. Pembangunan olahraga difokuskan untuk menciptakan dan mengembangkan budaya berolahraga bagi masyarakat dengan harapan terwujudnya kehidupan yang sehat jasmani dan rohaninya.

6. Terwujudnya karakter yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4.2.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Ber-kembang dengan Bertumpu pada Potensi Industri, Pertanian dan Pariwisata dengan Tetap Mengedepankan Keberpihakan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, melalui :

1. Perekonomian daerah dikembangkan ke arah perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global dengan memanfaatkan potensi lokal.
2. Perekonomian daerah dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat.
3. Kelembagaan ekonomi dibangun dan dikembangkan guna menciptakan regulasi dan perijinan yang efisien, efektif dan tidak diskriminatif, serta mengembangkan BUMD yang mengarah pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
4. Pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi diarahkan pada perluasan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
5. Pembangunan UMKM dan koperasi diarahkan untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tinggi dan mampu menghadapi globalisasi.

4.2.3. Mewujudkan Otonomi Daerah Bersendikan Tata Pemerintahan yang Baik, Demokratis dan Bertanggung Jawab, serta Profesionalisme Aparatur, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melalui :

1. Dalam mewujudkan kedewasaan politik masyarakat perlu peningkatan pemahaman paradigma politik yang desentralisasi dan pendidikan politik, sehingga tidak menimbulkan euforia politik.
2. Dalam mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis partisipasi masyarakat perlu dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri.
3. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan menjamin efektivitas pemanfaatan. Pengelolaan keuangan daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan kapasitas keuangan daerah.
4. Penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kualitas produk hukum.
5. Peningkatan kerjasama antar daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah.
6. Pembangunan aparatur diarahkan untuk mewujudkan sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter yang baik.
7. Penataan kelembagaan kearsipan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pembangunan sistem kearsipan daerah.

8. Memelihara kondisi keamanan ketertiban yang cukup kondusif di daerah dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.2.4. Mewujudkan Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, melalui :

1. Pembangunan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum mengacu UU No. 4 tahun 1997 tentang *acceptabilitas* bagi kaum *diffabel*.
2. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah.
3. Pembangunan air minum diarahkan pada peningkatan akses masyarakat Kabupaten Karanganyar terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum.
4. Pembangunan listrik diarahkan pada pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan listrik daerah dan peningkatan kemampuan pelayanannya.
5. Pembangunan perumahan dan pemukiman diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan pemukiman dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah.
6. Penanganan persampahan dan drainase pada permukiman diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap persampahan dan drainase.

7. Pembangunan penataan ruang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan dan pembangunan berkelanjutan.

4.2.5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat dan Budaya yang Sejahtera, Aman, dan Damai dengan Kepastian Hukum dan Penegakan HAM serta Kesetaraan Gender, melalui:

1. Pembangunan kependudukan diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk, sehingga tercipta kondisi penduduk yang terkendali dan sejahtera.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan.
3. Penanggulangan keMiskinan yang komprehensif, integral dan berkelanjutan dan nyata serta mudah dilakukan.
4. Pembangunan budaya daerah diarahkan pada pengembangan seni dan budaya melalui pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan nenek moyang kita.
5. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada memperkuat kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga keadilan gender terjamin.
6. Peningkatan peran serta masyarakat terus kita pacu atau didorong dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan HAM dalam menghadapi hidup setiap harinya.

4.2.6. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan kompetitif, melalui :

1. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem dalam artian tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan.
2. Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup merupakan modal pembangunan daerah dalam perspektif pembangunan. Untuk itu, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan daerah.
3. Pembangunan yang ramah lingkungan akan dijalankan melalui pengendalian pencemaran lingkungan dan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan industri.
4. Pembangunan kehutanan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk peningkatan partisipasi masyarakat.

4.3. Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah

Dalam rangka untuk mengemban pencapaian visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka dirumuskanlah agenda Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disusun dengan berdasarkan atau mengacu pada substansi misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Setiap agenda Pembangunan Jangka Panjang Daerah disertai dengan beberapa sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap

berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Setiap sasaran pokok dalam enam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut :

4.3.1. RPJPD Tahap Lima Tahun Pertama (2005-2009)

4.3.1.1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dalam Mendukung Keberadaan Masyarakat Karanganyar yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa , Cerdas, Sehat, dan Bermartabat melalui :

1. Peningkatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Karanganyar yang ditandai dengan meningkatnya anggaran pendidikan dan percepatan Wajib Belajar 9 tahun.
2. Peningkatan Derajat kesehatan dalam rangka menata kembali pelaksanaan pembangunan daerah yang ditandai dengan menurunnya angka kematian ; Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH:<125, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH;9,6, Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH ; <1,15, dan Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) :>71,8
3. Peningkatan kepedulian pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.
4. Peningkatan kepedulian terhadap nilai-nilai lokal yang dijiwai keberjuangan 45 dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Kabupaten Karanganyar.

5. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEK yang berbasis pada peningkatan jejaring penelitian IPTEK yang mampu mendorong berkembangnya teknologi tepat guna dan perluasan lapangan kerja.

4.3.1.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Ber-kembang dengan Bertumpu pada Potensi Industri, Pertanian dan Pariwisata dengan Tetap Mengedepankan Keberpihakan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, melalui :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar antara lain ditandai dengan menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk Miskin sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, serta semakin meningkatnya kinerja UMKM dan koperasi.
2. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan produk unggulan daerah melalui integrasi sektor hulu dan hilir.
3. Peningkatan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan pariwisata.
1. Pemberdayaan aset-aset daerah melalui pembenahan manajemen pengelolaannya.
2. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan serta perhutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agrobisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
3. Pengembangan sektor-sektor strategis didayagunakan untuk memperkuat perekonomian daerah.

4. Pengembangan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing daerah.
5. Pengembangan sektor industri dan UMKM serta koperasi diarahkan untuk memperkuat basis industri yang mempunyai daya saing.
6. Peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
7. Menciptakan iklim usaha yang menguntungkan bagi koperasi dan pengusaha kecil dan menengah dengan cara memberikan beberapa fasilitas yang menunjang kemajuan kegiatan usaha koperasi dan pengusaha kecil.

4.3.1.3. Mewujudkan Otonomi Daerah Bersendikan Tata Pemerintahan yang Baik, Demokratis, dan Bertanggung Jawab, serta Profesional Aparatur, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesi analitis aparatur, bebas dari KKN dan pengembangan jejaring.
2. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* antara lain melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Peningkatan kualitas aparatur melalui peningkatan kesadaran akan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika dan berwibawa.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar.

5. Peningkatan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum.
6. Peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
7. Peningkatan kualitas kelembagaan lokal yang berbasis kepada nilai-nilai lokal yang bersumber dari jati diri budaya masyarakat Jawa Tengah umumnya dan khususnya Kabupaten Karanganyar.
8. Peningkatan kerjasama dan kemitraan strategis antar pelaku pembangunan daerah secara partisipatif.
9. Perlunya peningkatan upaya-upaya percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

4.3.1.4. Mewujudkan Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, melalui :

1. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana umum dengan ditandai 1)meningkatnya sarana dan prasarana umum, 2)peningkatan prasarana pendukung seperti pemasangan rambu lalu lintas.
2. Pembangunan hunian baru dalam rangka mengurangi kesenjangan antara kebutuhan rumah dengan kemampuan penyediaan hunian akibat penambahan penduduk, serta peningkatan cakupan layanan sarana prasarana perumahan dan pemukiman terutama air bersih dan sanitasi.
3. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi, guna mendukung aktifitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan pedesaan, melalui konservasi

sumber-sumber air, pendayagunaan irigasi, air baku, drainase, industri serta pengendalian banjir dan kekeringan.

4. Peningkatan cakupan pelayanan administrasi pertanahan melalui perbaikan system informasi manajemen pertanahan.
5. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui pemulihan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan serta pengembangan kawasan prioritas dan sistem perkotaan. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.
6. Pengembangan sistem dan sarana prasarana telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan cakupan layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat luas.
7. Peningkatan ratio elektrifikasi melalui perluasan cakupan layanan energi listrik bagi masyarakat pedesaan, serta pemenuhan energi listrik untuk industri yang ada melalui perluasan jaringan distribusi.
8. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis. Di kabupaten Karanganyar telah ditetapkan kawasan strategis yang meliputi : kawasan Lindung, Kawasan Budidaya, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertambangan.

4.3.1.5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera, Aman, Damai dengan Kepastian Hukum, Penegakan HAM, dan Kesetaraan Gender, melalui :

1. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan tumbuh kembang anak yang berkualitas.

2. Peningkatan kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui peningkatan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat.
3. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses sumberdaya ekonomi dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat miskin.
4. Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.
5. Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip-prinsip dasar HAM dan **kepastian hukum** melalui pemasyarakatan dan pendidikan HAM, serta peningkatan etika dan moral berbangsa dan bernegara. Pengertian **kepastian hukum** yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan atau Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
6. Meningkatkan kelembagaan dan mendorong kinerja ekonomi daerah dalam rangka perluasan kesempatan kerja serta pemberdayaan perempuan.
7. Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas kesehatan reproduksi dalam rangka menuju keluarga sejahtera dan mandiri.

4.3.1.6. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Kompetitif, melalui :

1. Meningkatkan penegakan hukum di lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.

2. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
3. Peningkatan pelestarian aneka ragam hayati dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati dalam rangka penyusunan profil Sumber Daya Alam..
4. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
5. Peningkatan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geografi dan geologi wilayah Kabupaten Karanganyar.
6. Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap daerah Kabupaten perlu menetapkan luasan kawasan lindung sekitar 30 % dari ruang terbuka hijau 30 % (20% untuk publik dan 10% untuk privat). Di dalam RTRW Kabupaten telah ditetapkan kawasan lindung yang meliputi: Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yang terdiri hutan lindung dan suaka alam, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Lindung Sempadan Sungai, Kawasan Lindung Sekitar Waduk, dan Kawasan Sekitar Mata Air, Kawasan Lindung terdiri Suaka Alam dan Cagar Budaya , serta Kawasan Lindung Rawan Bencana.

4.3.2. RPJPD Tahap Lima Tahun Kedua (Tahun 2010-2014)

4.3.2.1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Ung-gul dalam Mendukung Keberadaan Masyarakat Karanganyar yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, dan Bermartabat, meliputi :

1. Pengembangan pemerataan akses dan mutu pendidikan yang ditandai dengan : 1) meningkatnya pencitraan tata kelola pendidikan, 2) wajar dikdasmen, kompetensi tenaga pendidik serta relevansi kurikulum pendidikan yang s penuntasan WAJAR 9 tahun, 3) rintisan Wajar 12 tahun, 4) rintisan sekolah bertaraf internasional, 5) rintisan Kabupaten Vokasi, 6) rintisan sekolah standar nasional (4 komponen).
2. Peningkatan derajat kesehatan dalam rangka memantapkan penataan kembali pelaksanaan pembangunan daerah yang ditandai dengan menurunnya angka kematian yaitu: AKI per 100.000 KH:<107,35, AKB per 1.000 KH:9,6, AKABA per 1.000 KH:<1,15 dan UHH (tahun) :>71,8.
3. Pengembangan kepedulian pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan.
4. Pengembangan kesadaran penerapan etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.
5. Pengembangan dan penerapan hasil penelitian dan IPTEK yang mampu mendorong berkembangnya teknologi madya di berbagai bidang sesuai budaya lokal.

3.2.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Ber-kembang dengan Bertumpu pada Potensi Industri, Pertanian dan Pariwisata dengan tetap Mengedepankan Keberpihakan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, meliputi :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah , sehingga dapat mengembangkan kemampuan dalam memacu kesejahteraan masyarakat.

2. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan produk unggulan daerah melalui sinergitas sektor hulu dan hilir.
3. Pengembangan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan pariwisata
4. Berkembangnya aset-aset daerah melalui pembenahan manajemen yang profesional.
5. Peningkatan diversifikasi produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan perhutanan diarahkan untuk diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketahanan pangan.
6. Peningkatan pengembangan sektor- sektor strategis didayagunakan untuk memperkuat perekonomian daerah menuju daerah yang potensial.
7. Perluasan pengembangan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan keunggulan produk.
8. Pengembangan peran UMKM dan koperasi yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan infrastruktur pendukung dan penguatan kelembagaan dalam rangka mendorong daya saing UMKM dan koperasi.
9. Berkembangnya investasi untuk mendorong pertumbuhan sektor industri dan jasa dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
10. Menciptakan iklim usaha yang kondusif utamanya bagi pengembangan koperasi dan usaha kecil yang potensial.

3.2.3. Mewujudkan Otonomi Daerah Bersendikan Tata Pemerintahan yang Baik, Demokratis dan Bertanggung Jawab serta profesional aparatur, bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), meliputi :

1. Peningkatan tata pemerintahan yang baik , demokratis dan bertanggung jawab dan bebas KKN.
2. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Peningkatan kualitas aparatur melalui penerapan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa, menuju aparatur yang lebih tangguh.
4. Pengembangan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
5. Pengembangan proses demokratisasi, politik dan penegakan hukum melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik serta akuntabilitas aparat dan penegak hukum.
6. Pengembangan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinergis.
7. Pengembangan peran kelembagaan lokal yang berbasis jatidiri budaya masyarakat Kabupaten Karanganyar dalam pembangunan daerah.
8. Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis pada sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.

9. Pengembangan upaya-upaya percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

4.3.2.4. Mewujudkan Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar, dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, melalui :

1. Pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan kabupaten dengan ditandai : 1)penuntasan perbaikan jalan kabupaten 362 ruas, panjang 832 km, 2)percepatan pembangunan jalan desa, 3)peningkatan prasarana pendukung seperti peningkatan terminal tingkat kecamatan, 4)pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
2. Peningkatan kualitas hunian dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang terjangkau oleh Rumah Tangga Miskin, serta peningkatan layanan sarana prasarana perumahan dan pemukiman terutama air bersih, sanitasi dan persampahan.
3. Pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi, guna mendukung aktivitas produksi yang berdaya saing, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan pedesaan, didukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.
4. Peningkatan kualitas sistem pelayanan administrasi pertanahan sesuai standar pelayanan minimal.
5. Pengembangan penataan ruang melalui pemulihan dan penetapan kawasan lindung, peningkatan kualitas penanganan kawasan budaya sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, serta pengembangan kawasan prioritas dan sistem perkotaan.
6. Pengembangan sistem pengelolaan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan teknologi informasi dalam peningkatan kelembagaan maupun peraturan-peraturannya terkait dengan keamanan,

kerahasiaan, privasi dan integrasi informasi serta peningkatan peran penyelenggaraan telekomunikasi yang menunjang penyelenggaraan telematika melalui optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telekomunikasi serta prasarana non telekomunikasi.

7. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui perbaikan jaringan distribusi dan penelitian untuk pemanfaatan sumber listrik alternatif serta perluasan dan peningkatan ketersediaan energi listrik untuk perluasan industri melalui peningkatan pembangunan pusat-pusat pembangkit listrik baru.
8. Peningkatan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.

4.3.2.5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera, Aman, Damai dengan Kepastian Hukum, dan Penegakan HAM, serta Kesetaraan Gender, melalui :

1. Pengembangan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak yang berkualitas.
2. Pengembangan profesionalitas penanganan penyandang masalahkesejahteraan sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pelaksana.
3. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan kualitas dan kapasitas akses sumberdaya ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
4. Pengembangan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah serta peningkatan kesadaran masyarakat dan penegak hukum.
5. Pengembangan kesadaran masyarakat, aparat memahami prinsip-prinsip dasar HAM dan kepastian hukum.

6. Pengembangan kinerja kelembagaan dan mendorong akselerasi kinerja ekonomi daerah dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan perempuan.
7. Pengembangan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas kesehatan reproduksi dalam rangka menuju keluarga sejahtera dan mandiri.

4.3.2.6. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Kompetitif, melalui :

1. Pengembangan penegakan hukum di lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
2. Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaan dalam rangka rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
3. Pengembangan dan inventarisasi pengelolaan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat dalam rangka perlindungan sumberdaya genetik.
4. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat dan penegakan hukum lingkungan serta penataan open space sebagai area rekreasi.
5. Pengembangan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geografi dan geologi wilayah Kabupaten Karanganyar.

6. Penyesuaian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa setiap daerah kabupaten perlu menetapkan luasan kawasan lindung sekitar 20%. (di dalam RTRW Kabupaten telah ditetapkan).

4.3.3. RPJP Tahap Lima Tahun Ketiga (Tahun 2015-2019)

4.3.3.1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Ung-gul dalam Mendukung Keberadaan Masyarakat Karanganyar yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, dan Bermartabat, melalui :

1. Pemerataan pendidikan yang bermutu yang ditandai dengan :
1)meningkatnya relevansi daya saing, 2)penguatan Wajar 9 tahun, 3)percepatan Wajar 12 tahun, 4)penguatan sekolah bertaraf internasional, 5)penguatan Kabupaten Vokasi, 6)penguatan sekolah standar nasional (6K).
2. Peningkatan derajat kesehatan dalam rangka memantapkan penataan kembali pelaksanaan pembangunan daerah disegala bidang, dengan penekanan pada pencapaian daya saing/ kompetitif kesehatan ditandai dengan menurunnya angka kematian :AKI per 100.000 KH:<70, AKB per 1.000 KH:8,43, AKABA per 1.000 KH:<1,02 dan UHH (tahun) :>72
3. Penguatan aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka peningkatan kualitas jatidiri yang berbasis pada modal sosial yang makin berkembang dan semakin taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. Penguatan kepedulian terhadap nilai kepejuanganbdalam rangka memperkuat identitas masyarakat Kabupaten Karanganyar sesuai budaya lokal daerah.
5. Penguatan kualitas SDM dan kelembagaan yang mampu menghasilkan aplikasi IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas termasuk industri.

4.3.3.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Ber-kembang dengan Bertumpu pada Potensi Industri, Pertanian dan Pariwisata dengan Tetap Mengedepankan Keberpihakan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, melalui :

1. Penguatan daya saing perekonomian daerah, melalui penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dalam arti luas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Penguatan struktur perekonomian dan koperasi yang berbasis pada pemanfaatan IPTEK dan produk unggulan daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dalam rangka mendorong pertumbuhan makin berkualitas.
3. Peningkatan kelembagaan ekonomi, kualitas produk dan sarana prasarana pendukung pertanian dalam arti luas.
4. Penguatan pengelolaan aset-aset daerah dalam rangka menggerakkan sektor riil sehingga mampu berdaya saing dalam mendorong peningkatan pembiayaan pembangunan daerah.
5. Penguatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis

guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka menciptakan swasembada pangan dan ekspor.

6. Penguatan sektor-sektor strategis didayagunakan untuk memperkuat perekonomian daerah.
7. Penguatan ketrampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
8. Penguatan peran UMKM yang berorientasi ekspor melalui pengembangan akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM.
9. Penguatan investasi untuk mendorong sektor industri dan jasa sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang banyak dan beraneka ragam ketrampilan.
10. Penguatan iklim usaha yang menarik dan aman bagi koperasi dan usaha kecil yang tersebar di berbagai daerah.

4.3.3.3. Mewujudkan Otonomi Daerah Bersendikan Tata Pemerintahan yang Baik, Demokratis dan Bertanggung Jawab serta Profesional Aparatur, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), meliputi :

1. Penguatan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggungjawab.
2. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Penguatan profesionalisme aparatur negara dalam mendukung pembangunan daerah.
4. Penguatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan standar pelayanan

minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

5. Penguatan sistem demokrasi, politik dan penegakan hukum melalui peningkatan kesadaran politik serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip keadilan dan HAM.
6. Penguatan kualitas perencanaan dan optimalisasi sumberdaya pembangunan yang didukung kemitraan yang lebih sinergis dengan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah.
7. Penguatan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan dapat menjamin efisiensi serta efektivitas pemanfaatan dana dalam rangka mewujudkan kapasitas keuangan daerah yang efisien dan efektif..
8. Penguatan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
9. Penguatan kapasitas dan kopotensi lembaga perwakilan rakyat daerah di bidang legislasi, pengawasan dan budgeting serta menguatnya pemberantasan KKN.

4.3.3.4. Mewujudkan Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, melalui :

1. Penguatan sarana dan prasarana umum dengan ditandai
1)penguatan pembangunan jalan kabupaten, 2)penguatan pembangunan jalan desa, 3)meningkatnya jaringan prasarana pendukung, 4)penguatan pembangunan obyek-obyek wisata.
2. Penguatan pembangunan hunian baru dalam rangka mengurangi kesenjangan antara kebutuhan rumah yang jumlahnya semakin banyak dan kompleks.

3. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelola prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi yang handal guna mendukung aktivitas produksi yang kompetitif serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan pedesaan.
4. Pengembangan sistem pelayanan administrasi pertanahan berbasis desa, serta peningkatan kualitas manajemen pertanahan.
5. Penguatan kualitas penataan ruang melalui pemulihan dan perluasan kawasan lindung, pengelolaan kawasan andalan dan strategis secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
6. Penguatan sistem dan sarana prasarana telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan daerah.
7. Penguatan ratio elektrifikasi melalui perluasan cakupan layanan energi listrik bagi masyarakat pedesaan.
8. Penguatan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.

4.3.3.5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera, Aman, Damai dengan Kepastian Hukum, dan Penegakan HAM serta Kesetaraan Gender, melalui :

1. Penguatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan tumbuh kembang anak yang berkualitas.
2. Penguatan sistem dan kelembagaan penanganan penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) dan Penanganan penduduk usia lanjut melalui peningkatan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat.
3. Penguatan aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati diri yang berbasis pada moral sosial yang

makin berkembang dalam rangka penguatan kapasitas akses sumberdaya ekonomi peningkatan daya beli serta kesejahteraan masyarakat miskin.

4. Penguatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah serta peningkatan kesadaran dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum.
5. Penguatan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan kepastian hukum serta peningkatan akses pasar baik domestik maupun internasional untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta pengurangan ketimpangan kesetaraan gender.
6. Penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak dalam setiap proses pembangunan daerah dan lebih taat pada kepastian hukum.
7. Penguatan derajat kesehatan dan kualitas kesehatan reproduksi dalam rangka menuju keluarga sejahtera dan mandiri.

4.3.3.6. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan kompetitif, melalui :

1. Penguatan penegakan hukum lingkungan melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
2. sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
3. Penguatan dan identifikasi kekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka menyusun profil sumber daya alam untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Penguatan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemanfaatan penegakan hukum lingkungan.
5. Penguatan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geografi dan kemajuan teknologi yang semakin canggih.
6. Penguatan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan fungsi pertamanan baik di lingkungan perkotaan dan pedesaan dan aplikasi penataan ruang sesuai UU nomor 26 tahun 2007 dengan penetapan luasan kawasan lindung sekitar 20%.

4.3.4. RPJP Tahap Lima Tahun Keempat (Tahun 2020-2024)

4.3.4.1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dalam Mendukung Keberadaan Masyarakat Karanganyar yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, dan Bermartabat, melalui :

1. Pemantapan perluasan mutu pendidikan dan budaya lokal ditandai dengan : 1)memantapnya relevansi daya saing, 2)pemantapan Wajar 9 tahun, 3)pemantapan Wajar 12 tahun, 4)pemantapan sekolah bertaraf internasional, 5)pemantapan Kabupaten Vokasi, 6)pemantapan sekolah standar nasional (8K).
2. Peningkatan derajat kesehatan dalam rangka memantapkan penataan kembali pelaksanaan pembangunan daerah disegala bidang, dengan penekanan pada pencapaian daya saing/ kompetitif kesehatan ditandai dengan menurunnya angka kematian :AKI per 100.000 KH:<50, AKB per 1.000 KH:6,3, AKABA per 1.000 KH:<1 dan UHH (tahun) :>72

3. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral yang ditandai dengan semakin tanggunya jatidiri, moral dan kesetiakawanan masyarakat berdasarkan Pancasila.
4. Pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka memperkuat jati diri dalam pergaulan nasional dan internasional.
5. Pemanfaatan penguasaan IPTEK di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

4.3.4.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Berkembang dengan Bertumpu pada Potensi Industri, Pertanian dan Pariwisata dengan tetap Mengedepankan Keberpihakan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, melalui :

1. Pemantapan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.
2. Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk sektor ekonomi yang strategis , berkualitas dan mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar global.
3. Pemantapan kelembagaan ekonomi, kualitas produk dan sarana prasarana pendukung sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata yang mampu bersaing di pasar global.
4. Pemantapan aset-aset daerah dalam rangka menggerakkan sektor riil dengan memanfaatkan iptek dan jejaring kelembagaan di pasar global.
5. Pemanfaatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan perhutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis, guna menjamin ketahanan pangan dalam rangka menciptakan swasembada pangan dan ekspor.

6. Memantapkan sektor-sektor strategis didayagunakan untuk memperkuat ekonomi daerah.
7. Pemantapan ketrampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
8. Pemantapan pengembangan sektor industri, jasa serta UMKM serta koperasi diarahkan memperkuat basis industri yang tangguh.
9. Mantapnya investasi untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas lapangan kerja.
10. Pemantapan iklim usaha yang tangguh, prospektif, nyaman utamanya bagi koperasi dan usaha kecil.

4.3.4.3. Mewujudkan Otonomi Daerah Bersendikan Tata Pemerintahan yang Baik, Demokratis dan Bertanggung Jawab serta Profesional Aparatur, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melalui :

1. Pemantapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta pengembangan jejaring.
2. Pemantapan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien sesuai prinsip pemerintahan yang baik.
3. Pemantapan profesional, kesadaran tanggungjawab, sikap mental, berbudi luhur bagi aparatur daerah.
4. Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada seluruh bidang pelayanan.

5. Pemantapan proses demokrasi, politik dan penegakan hukum melalui pemantapan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan dan HAM.
6. Pemantapan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pengembangan wilayah.
7. Pemantapan kelembagaan lokal yang berbasis jati diri budaya masyarakat Kabupaten Karanganyar, dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.
8. Pemantapan kerja sama dan kemitraan strategis antar pelaku pembangunan daerah secara partisipatif.
9. Pemantapan upaya-upaya perdepatan pembarantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

4.3.4.4. Mewujudkan Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, melalui :

1. Pemantapan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang kepentingan umum yang ditandai dengan: 1) pemantapan pembangunan jalan kabupaten, 2) pemantapan pembangunan jalan desa, 3) meningkatnya jaringan prasarana pendukung.
2. Pemantapan swadaya masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan pemukiman sehat, didukung peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman dengan tetap memberikan kemudahan bagi akses kepemilikan rumah bagi Rumah Tangga miskin.
3. Pemantapan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi, guna mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar pedesaan dan perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian,

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya konservasi sumber daya air, pendayagunaan serta pengendalian banjir dan kekeringan.

4. Mantapnya cakupan pelayanan administrasi pertahanan melalui perbaikan sistem informasi manajemen pertahanan.
5. Pemantapan penataan tata ruang dan pranata ekonomi yang tertata dan dinamis dalam mempercepat pembangunan daerah sesuai dengan perubahan daerah.
6. Pemantapan sistem sarana dan prasarana telekomunikasi yang mendukung kemajuan teknologi komunikasi untuk mendukung kemajuan daerah.
7. Pemantapan rasio elektrifikasi melalui cakupan layanan pelistrikan untuk memacu pertumbuhan sektor industri dan jasa, sehingga dapat memacu kemajuan daerah dengan cepat dan tepat, adil dan sejahtera.
8. Pemantapan pemanfaatan ruang wilayah didukung oleh penegakan hukum untuk menciptakan keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan andalan dan strategis secara kompetitif sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

4.3.4.5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera, Aman, Damai dengan Kepastian Hukum dan Penegakan HAM serta Kesetaraan Gender melalui :

1. Pemantapan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan tumbuh kembang anak.
2. Pemantapan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan

penduduk usia lanjut melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

3. Memantapkan kesempatan berusaha serta pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat terutama bagi penduduk miskin.
4. Pemantapan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum.
5. Pemantapan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip-prinsip dasar HAM dan kepastian hukum.
6. Pemantapan kondisi perekonomian daerah secara berkelanjutan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
7. Pemantapan derajat kesehatan dan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menuju keluarga sejahtera dan mandiri.

4.3.4.6. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan kompetitif, melalui:

1. Memantapkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan kekayaan alam dan penegakan terhadap hukum lingkungan hidup.
2. Pemantapan upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan di kawasan lindung.
3. Pemantapan sumber daya genetic berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan inventarisasi potensi keanekaragaman hayati.

4. Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan.
5. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh Kabupaten Karanganyar dan tetap waspada dan mantap menjaga mitigasi bencana alam.
6. Pemantapan aplikasi Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang utamanya penetapan luasan kawasan lindung sebesar 20%

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab merupakan kunci sukses Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah serta Jangka Panjang, mengingat dengan terciptanya keterbukaan maka efisiensi, efektifitas, akurasi dan akuntabilitas pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pemantapan sampai dengan pengkajian secara nyata akan tercipta pula, sehingga akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 diharapkan sebagai koridor dalam penyusunan Visi, Misi dan Program Prioritas calon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar. Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Karanganyar mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Propinsi Jawa Tengah dengan tujuan agar tercipta integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, Pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah.

Namun demikian, keberhasilan upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Karanganyar sangat tergantung pada peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat serta sikap, mental, etika, tekad dan semangat, ketaatan dan taat azas para penyelenggara Pemerintah Daerah.

Keberhasilan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan Visi “Karanganyar yang maju, berdayasaing, sejahtera dan mandiri” perlu didukung oleh 1) Komitmen dari

kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis, 2) Konsistensi kebijakan Pemerintah Daerah, 3) Keberpihakan pembangunan pada rakyat, dan 4) Peranan serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan.

BUPATI KARANGANYAR,



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH SPd, M. Hum